

Workshop:

Penyusunan Peta Proses Bisnis Berdasarkan PermenPANRB 19/2018

Disiapkan Khusus untuk:



Pemerintah Kabupaten Kebumen

Kebumen, 27 Febuari 2020

PERKENALAN

Martinus Tukiran adalah *Managing Director* Magna Transforma dan Cognoscenti Consulting Group. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang konsultansi, Martinus telah membantu banyak perusahaan dari berbagai macam industri dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sejak tahun 2008, Martinus juga merupakan konsultan untuk berbagai lembaga International seperti Australian Agency for International Development (AUSAID), United States Agency for International Development (USAID), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, dan DANIDA (Danish International Development Agency).

Sebelum berkarir sebagai konsultan, Martinus adalah seorang profesional di berbagai Group Perusahaan seperti Astra International, Raja Garuda Mas International, Garudafood, dll.

Martinus memiliki latar belakang pendidikan Doktor di bidang Manajemen Pendidikan, Magister di bidang Teknik Industri, dan Sarjana di bidang Teknik Mesin. Martinus juga merupakan dosen di beberapa perguruan tinggi di Asia.



**Dr. MARTINUS
TUKIRAN**

0811 180 352
martinus@ccg.co.id

PROFIL KONSULTAN

Ita adalah Konsultan Manajemen di Cognoscenti Consulting Group. Sebelum berkarir sebagai konsultan, Ita telah membantu banyak proyek di Sinar Mas Land BSD City. Ita meraih gelar Master dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Manajemen. Sebelumnya Ita juga meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen.

Sebagai konsultan di Cognoscenti Consulting Group, Ita berperan dalam beberapa proyek diantaranya Bisnis Proses DPD, Sistem Pengembangan Manajemen di Global Mandiri School (SGM), Strategic Alignment Management System di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyusunan SOP Makro DPD RI, Penyusunan Bisnis Proses PT Arhapro, Penyusunan SOP DPMPTSP DKI Jakarta, Penyusunan Proses Bisnis LKPP, dan Penyusunan Proses Bisnis Pemkot Blitar.



***NUGRAHENI
PUSPITA SARI, S.E.,
M.Si.***

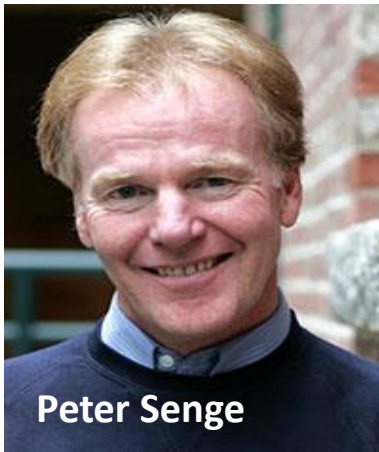
**Konsultan
Cognoscenti
Consulting Group**

Sasaran Program

Setelah mengikuti workshop ini peserta akan mampu:

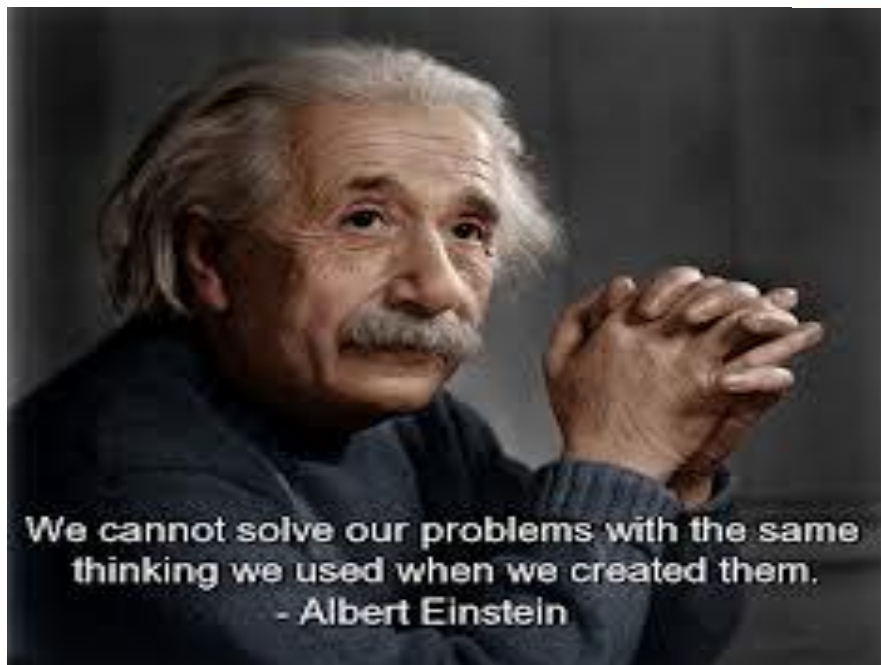
1. Memahami konsep Proses dan Proses Bisnis
2. Memahami Hubungan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro, dan SOP Mikro
3. Memahami metode penyusunan peta proses bisnis sesuai PermenPANRB 19/2018
4. Memiliki wawasan untuk dapat merencanakan, menyusun, dan melaksanakan, serta mengevaluasi peta proses bisnis di lingkungan PemKab Kebumen

QUIZ

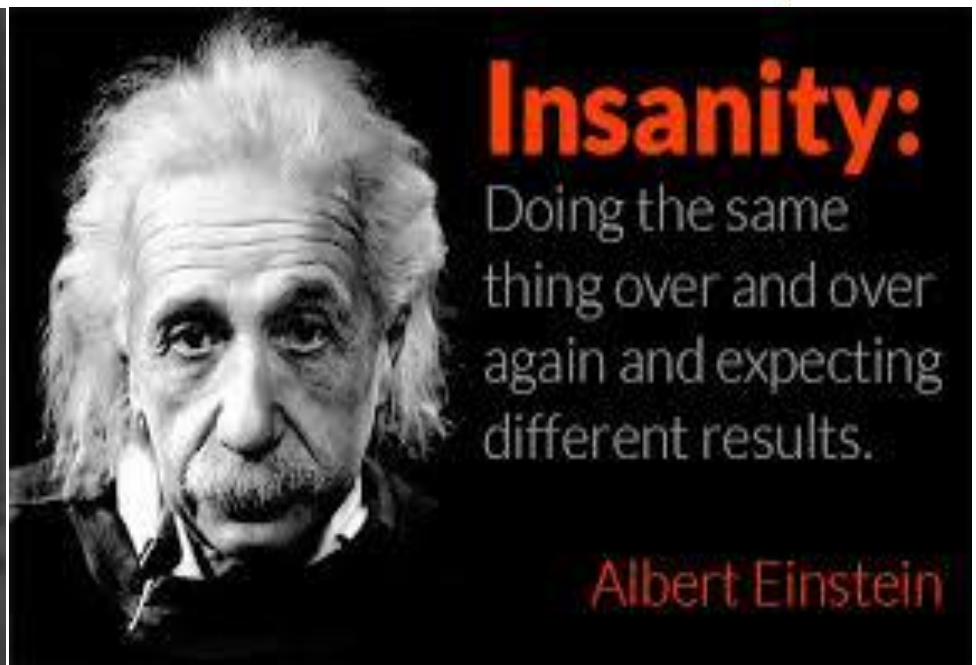


Peter Senge

**"The problems of today
are caused by
the solutions of yesterday"**



**We cannot solve our problems with the same
thinking we used when we created them.**
- Albert Einstein



Insanity:

Doing the same
thing over and over
again and expecting
different results.

Albert Einstein

Konsep Proses Bisnis Instansi Pemerintah

What is STRATEGY

STRATEGY : It is a deliberate process of choosing a set of activities differently, in order to deliver a unique mix of value

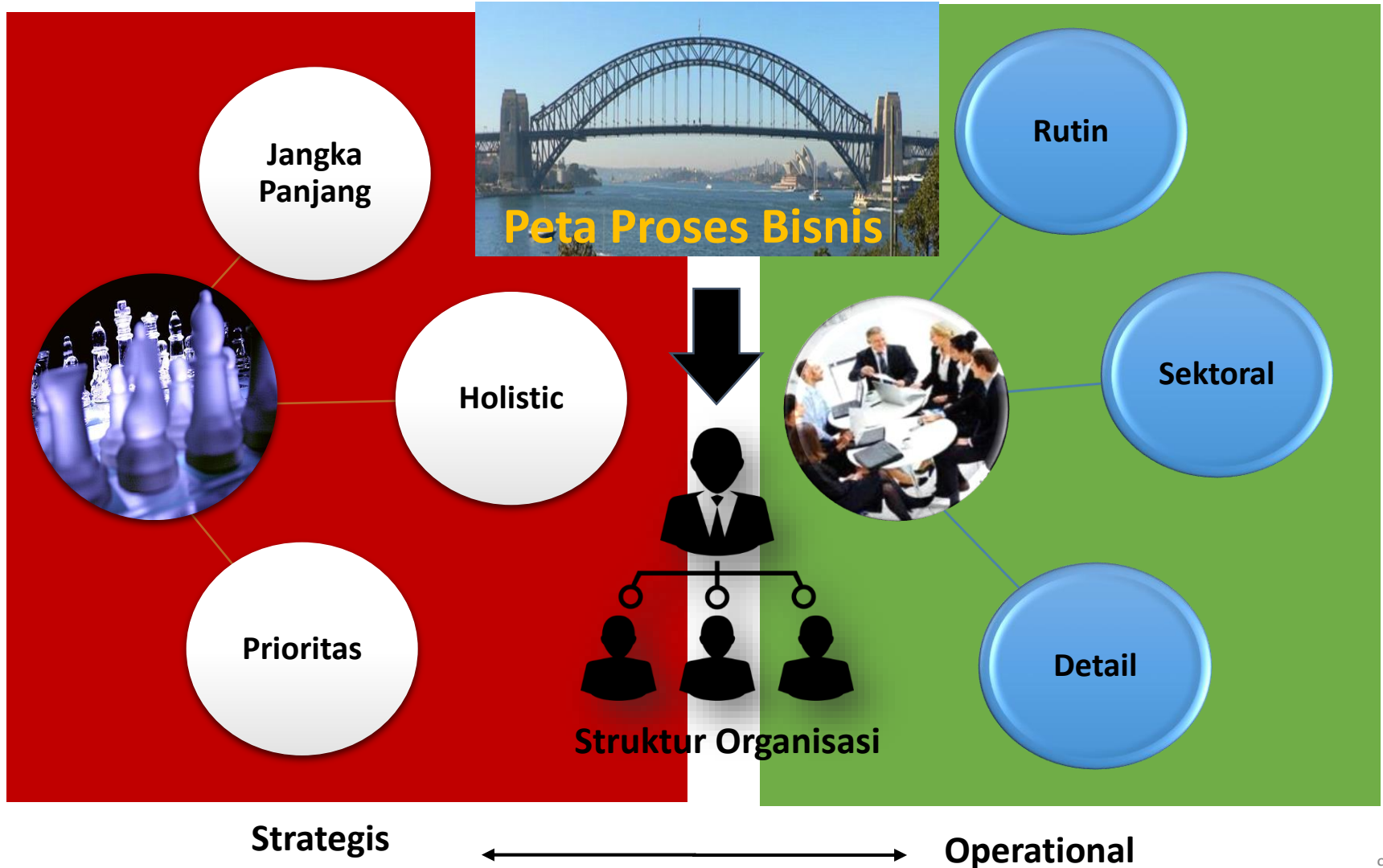
Strategi

“Sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu organisasi dalam rangka **menghasilkan nilai-nilai tambah** yang spesifik dan berbeda atau lebih baik.”

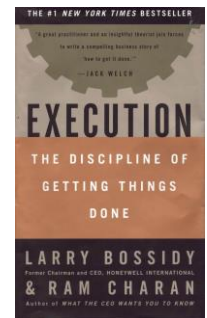
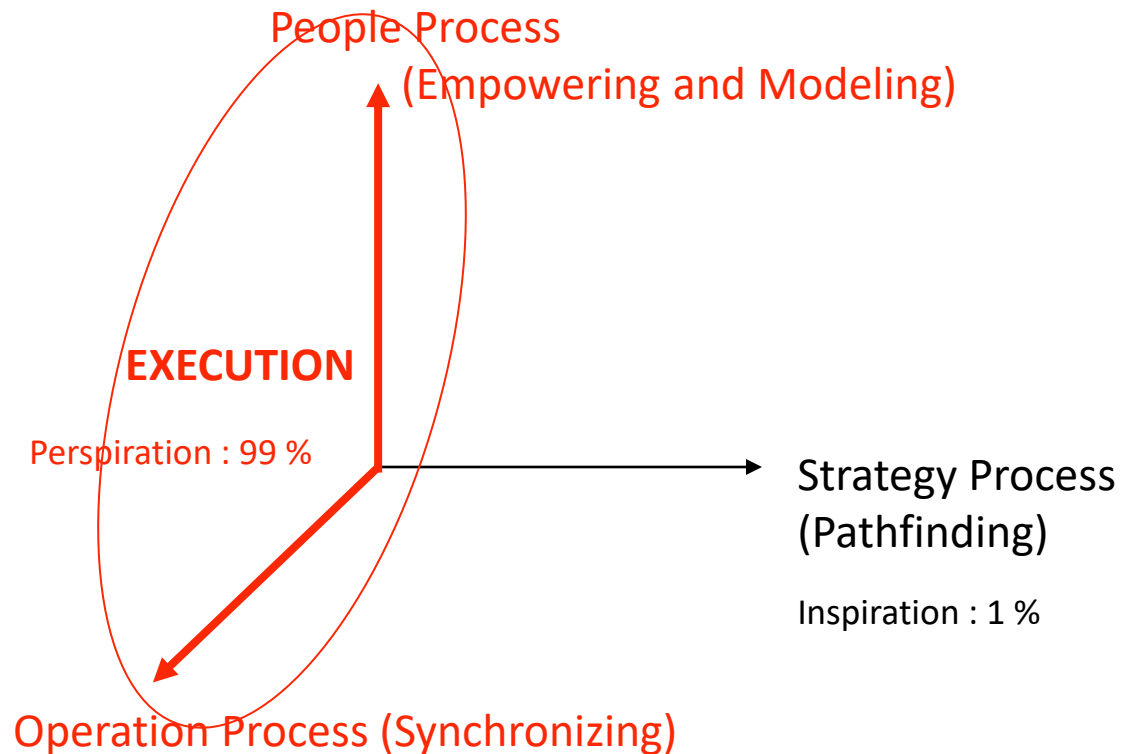
Manajemen Strategis

“Seluruh keputusan yang diambil dalam memilih strategi dan mengimplementasikannya”

Karakteristik Strategis & Operasional



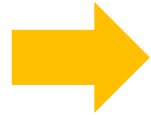
Sustainable high performance of a Organization takes three imperative processes



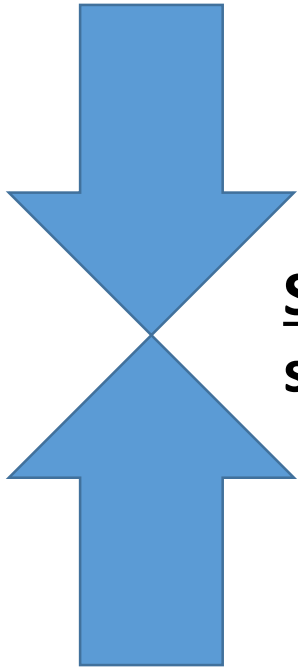
Source : "Execution. The Discipline of Getting Things Done" , Larry Bossidy & Ram Charan, 2009

Managing Strategy & Operation

Managing strategy

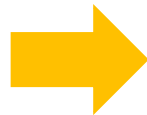


Success of managing strategy =
did not work (theoretical)

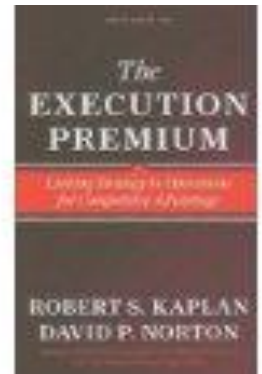


**Sustainable high performance organization takes
successful managing strategy & managing operation**

Managing operation

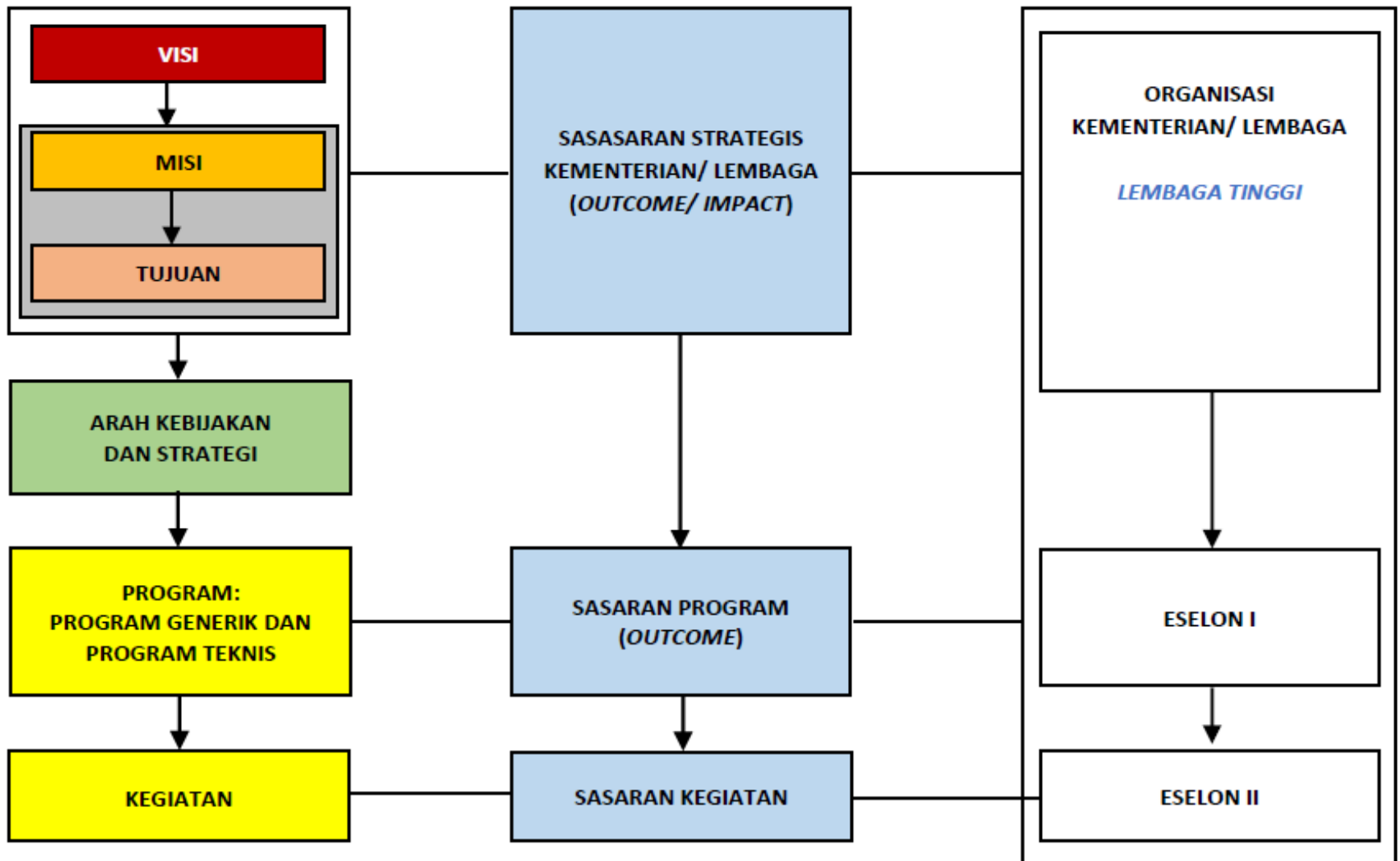


Success of managing operation
= a matter of luck

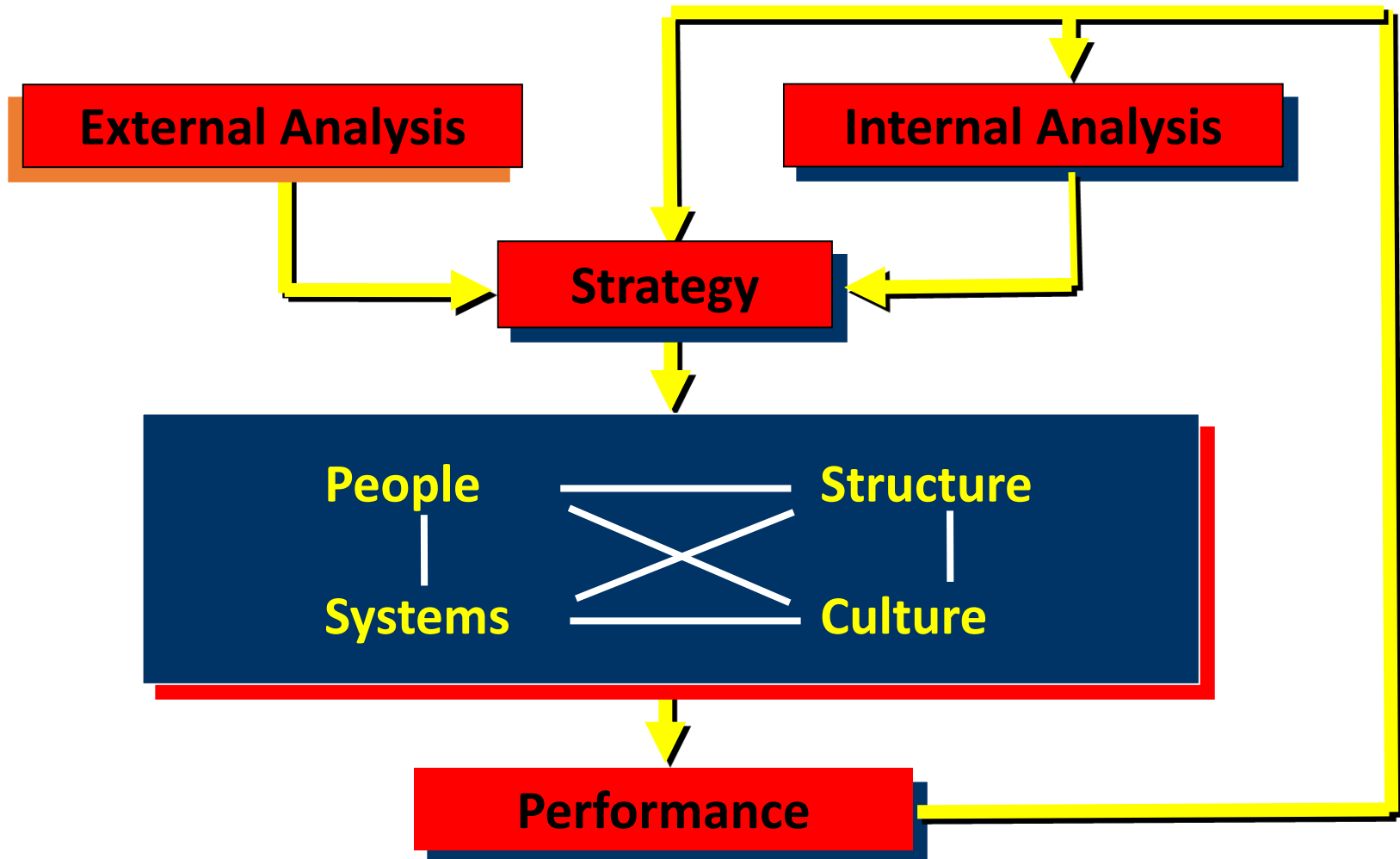


Source : "The Execution. Premium", Robert Kaplan & David Norton, 2008

Struktur Program K/L dalam Renstra K/L 2020-2024



A Framework for Analyzing Organizations



Adapted from Alfred Chandler, Strategy and Structure

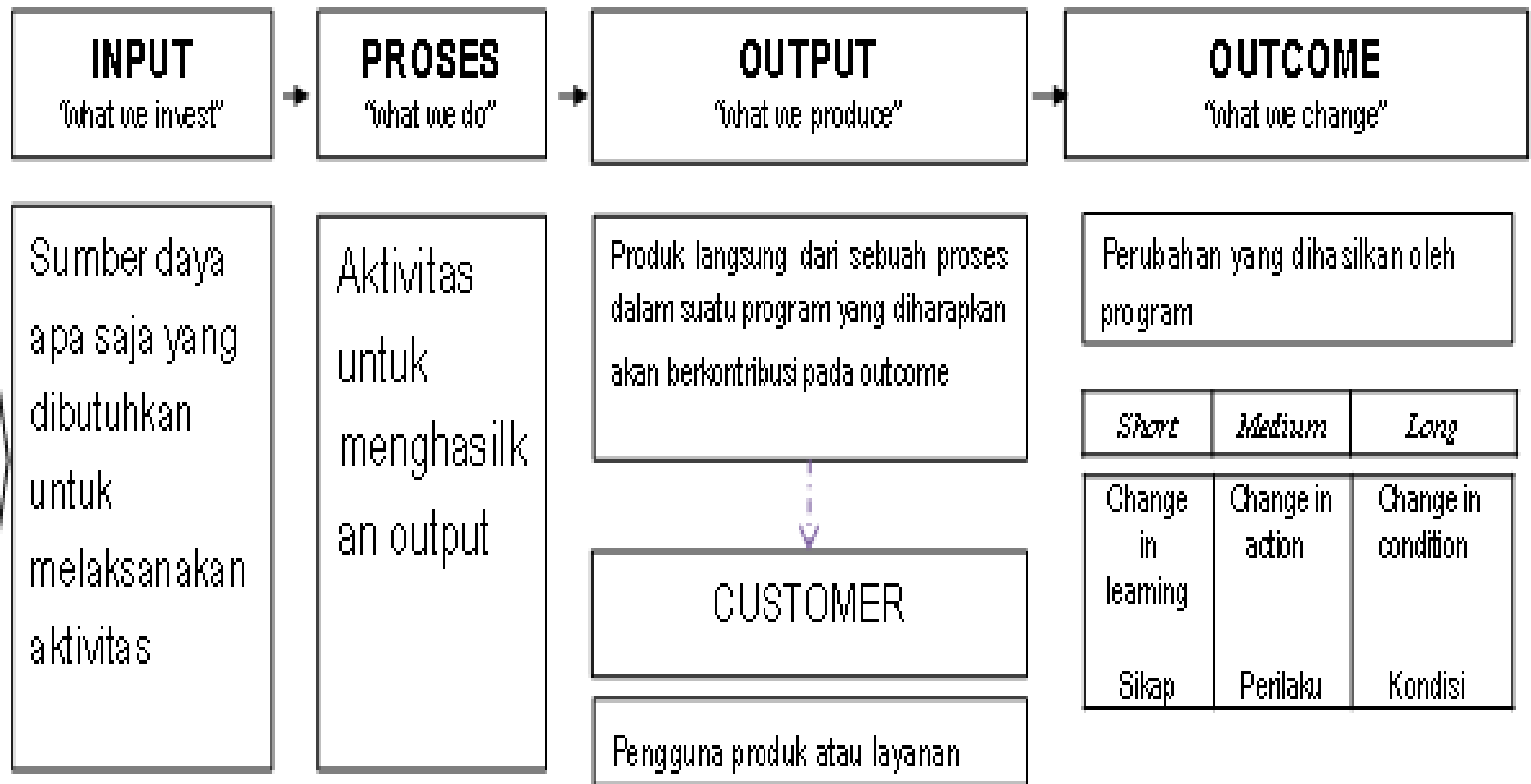


Unless structure follows
strategy, inefficiency results.

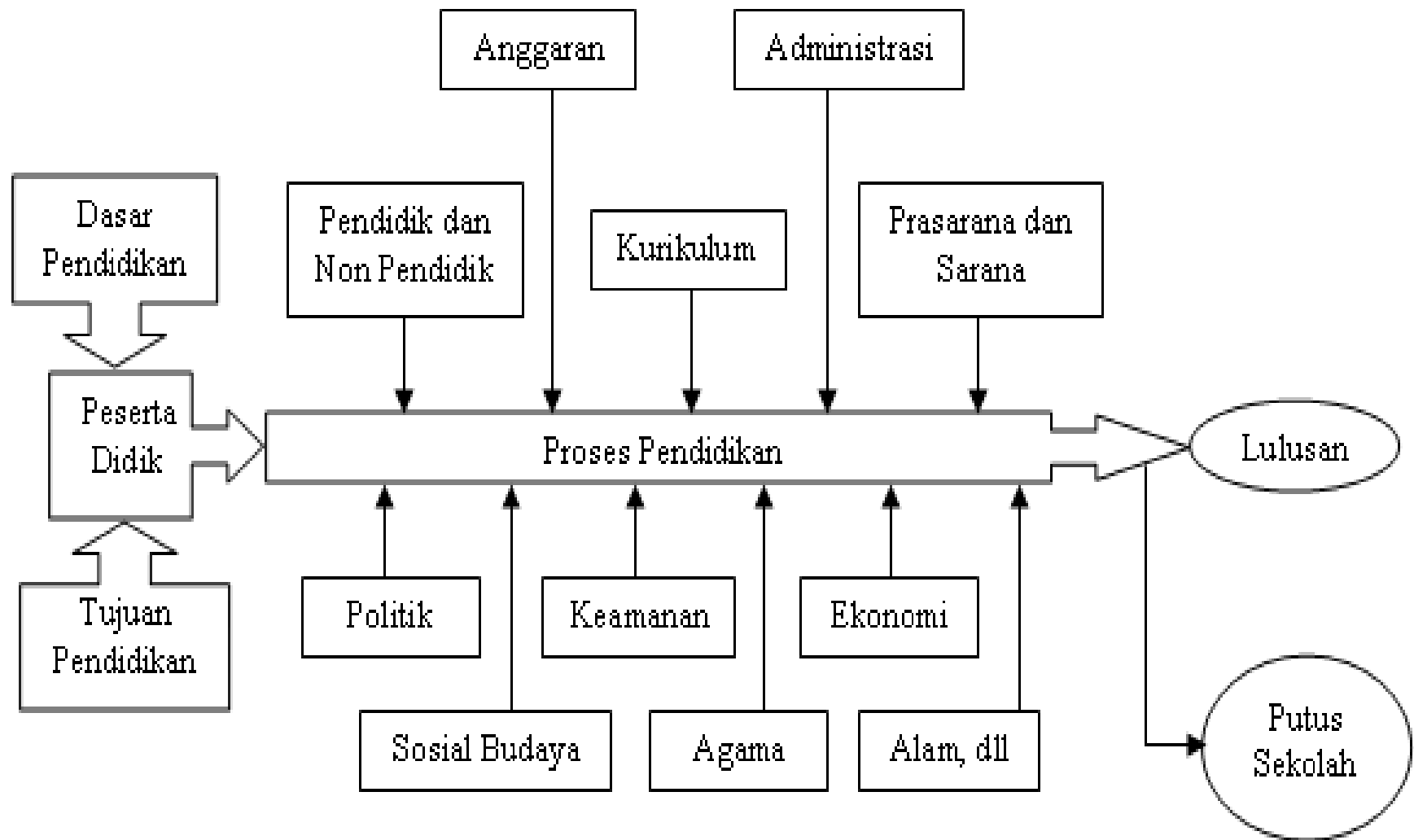
Alfred D. Chandler, Jr.

SITUASI

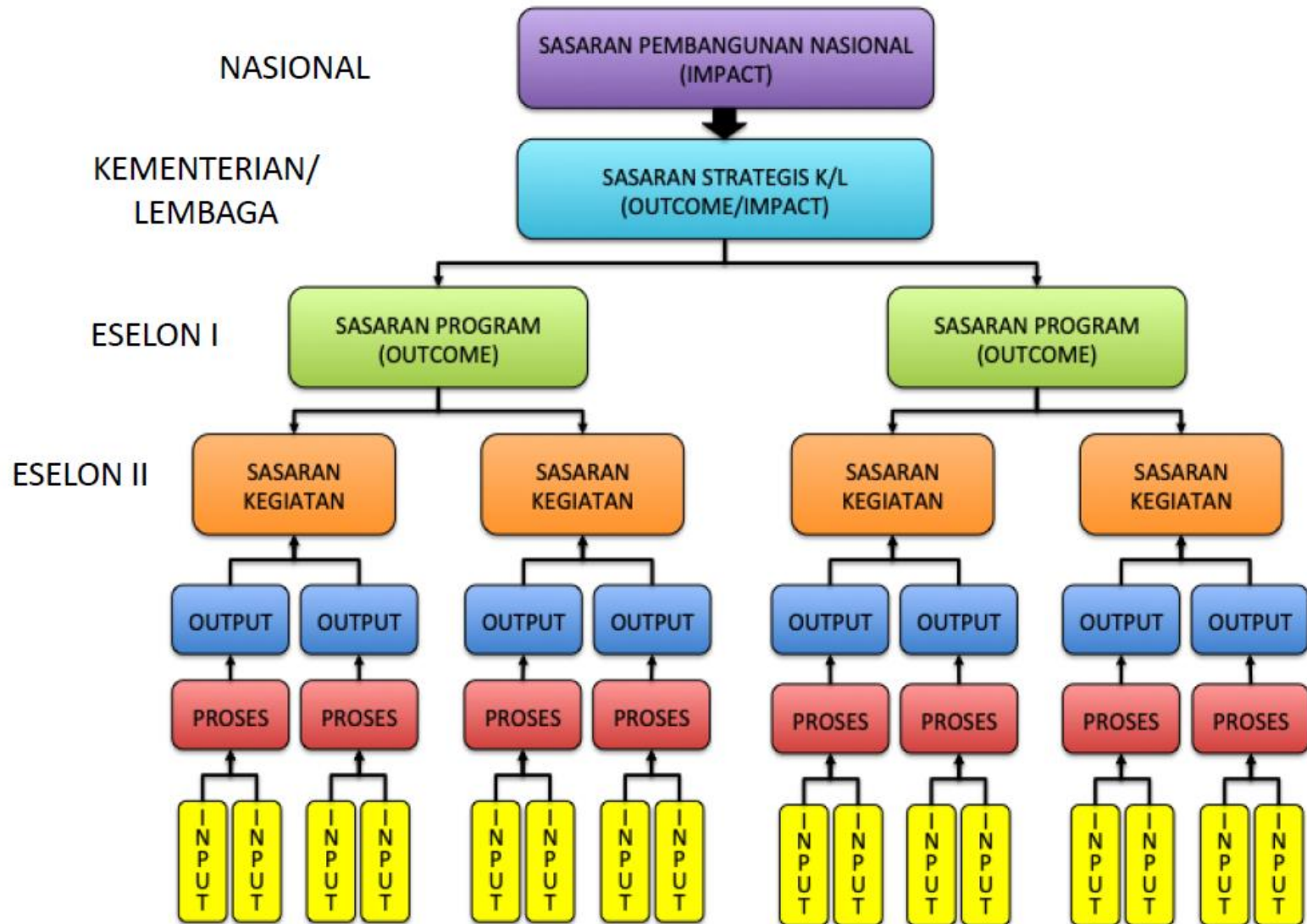
PRIORITAS

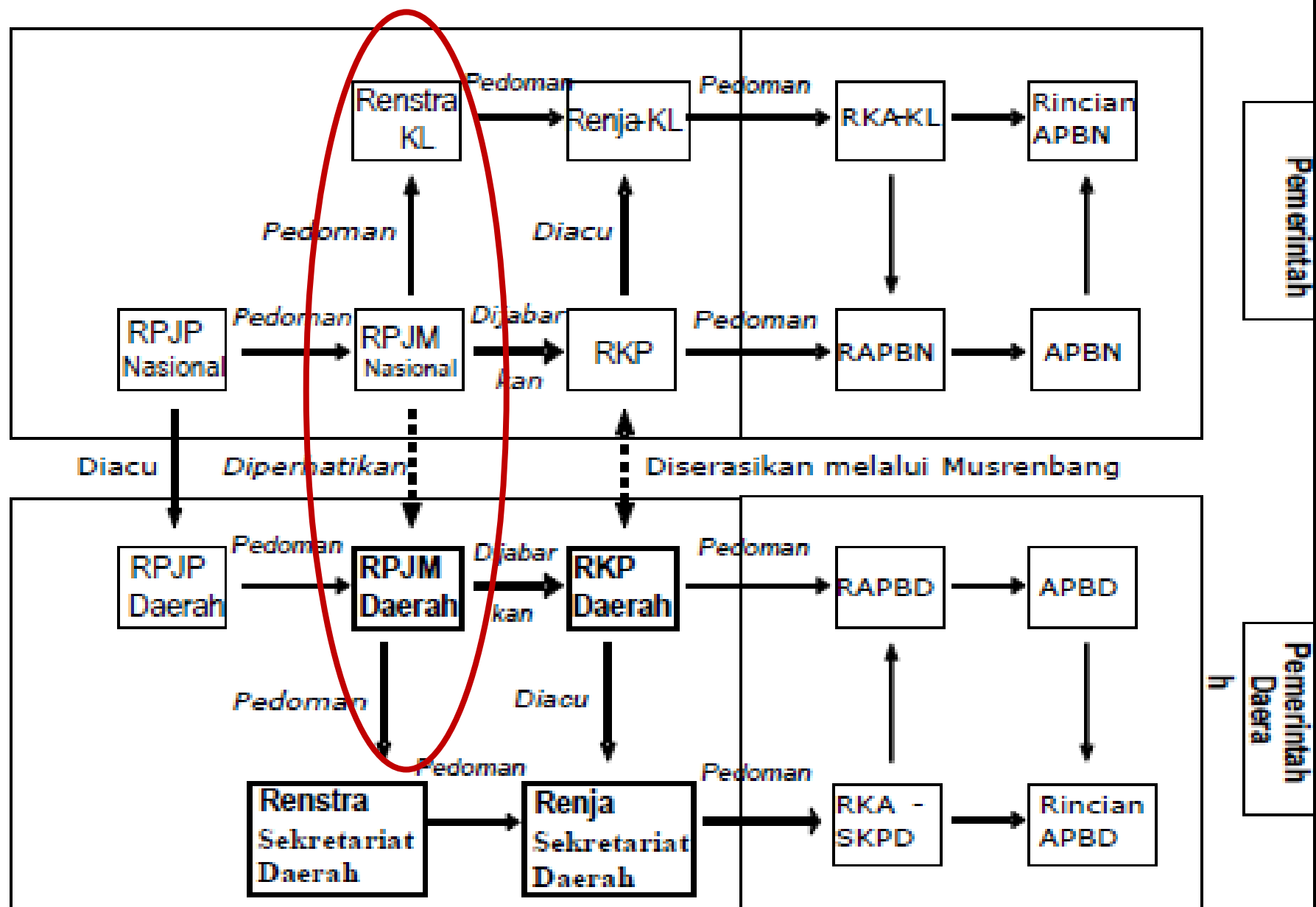


Raw Input, Instrumental Input, Environmental Input



HUBUNGAN KERANGKA KERJA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 25 tahun 2004





KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 35 TAHUN 2012

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut SOP AP) di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)

1.2 Tujuan

Tujuan pedoman tatalaksana (business process) adalah memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP), termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

Muara dari penataan tatalaksana (business proses) adalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
- b. Perbaikan struktur organisasi; dan
- c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

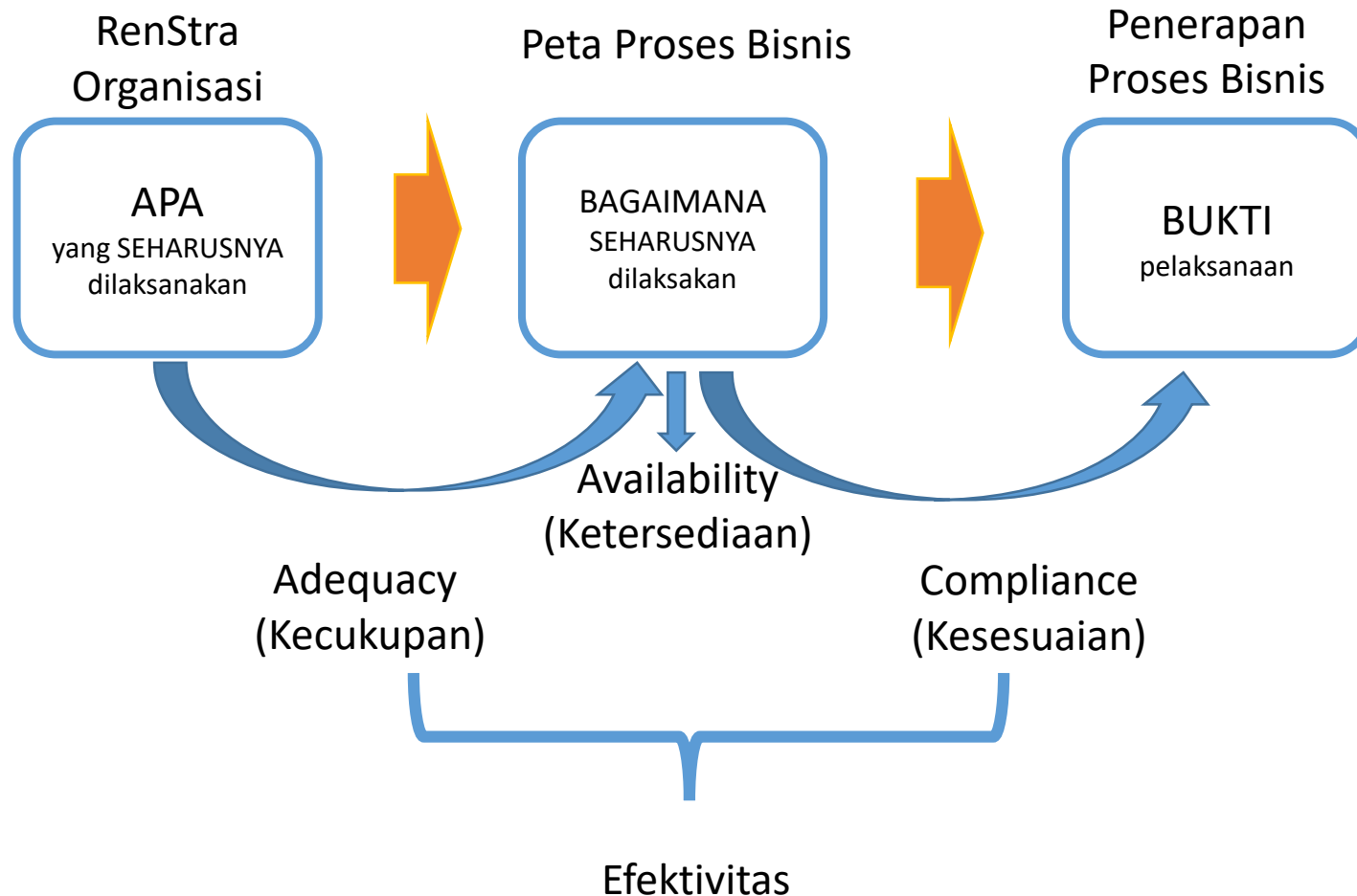
**PEDOMAN EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH**

4. Penataan Tatalaksana

Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

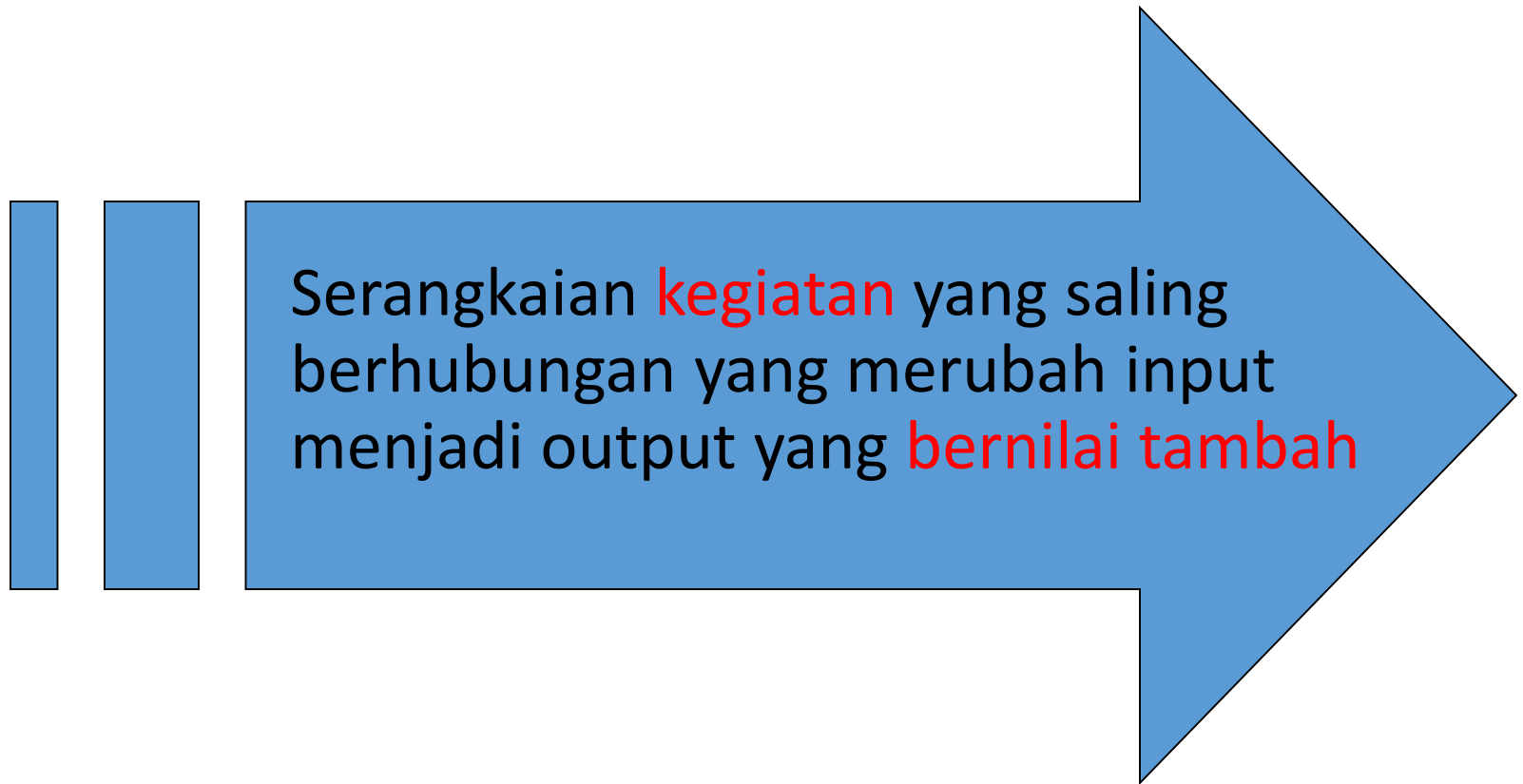
- 1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- 2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
- 3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

Skema Kriteria Evaluasi Proses Bisnis

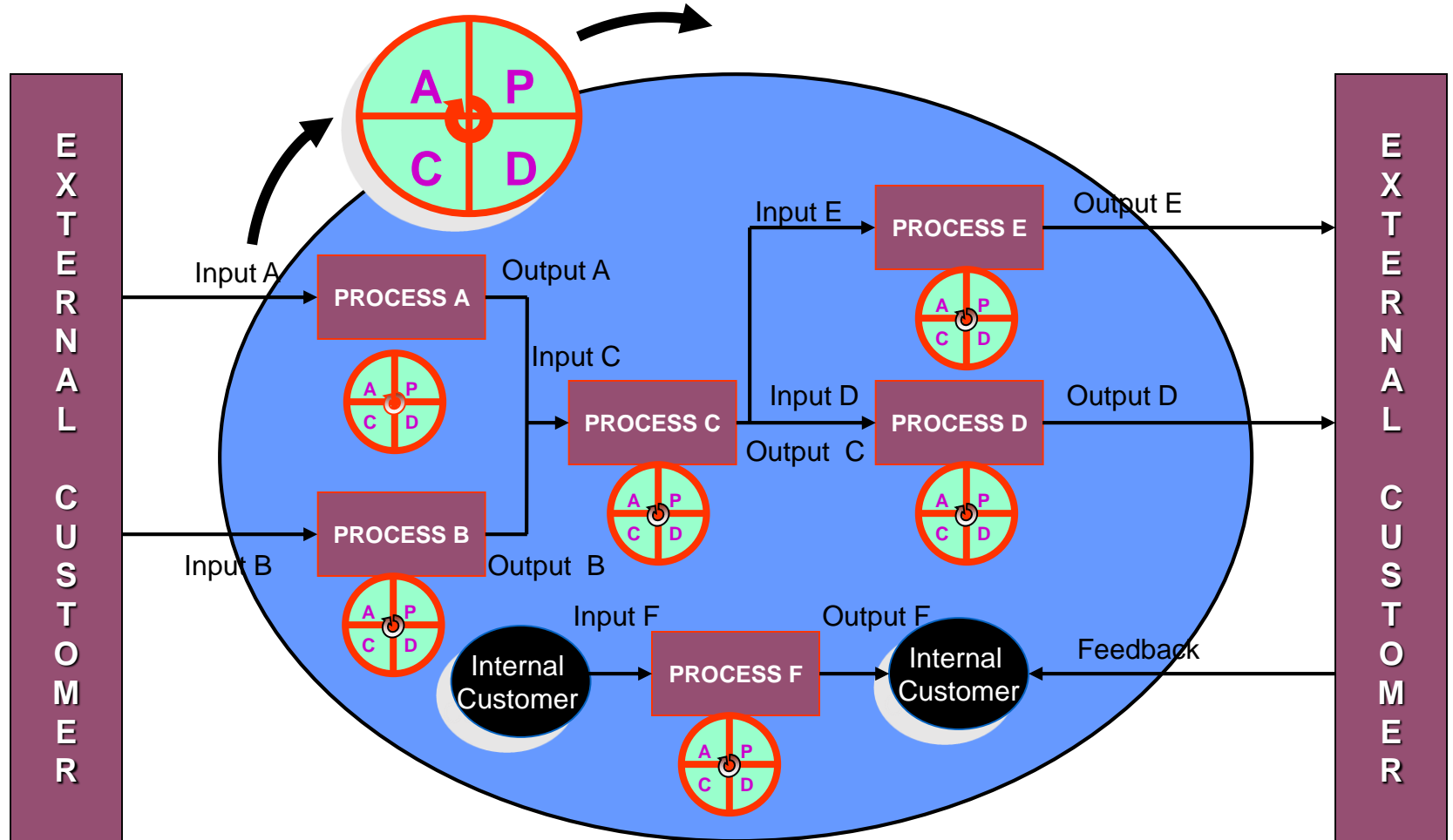


Metode Penyusunan Peta Proses Bisnis

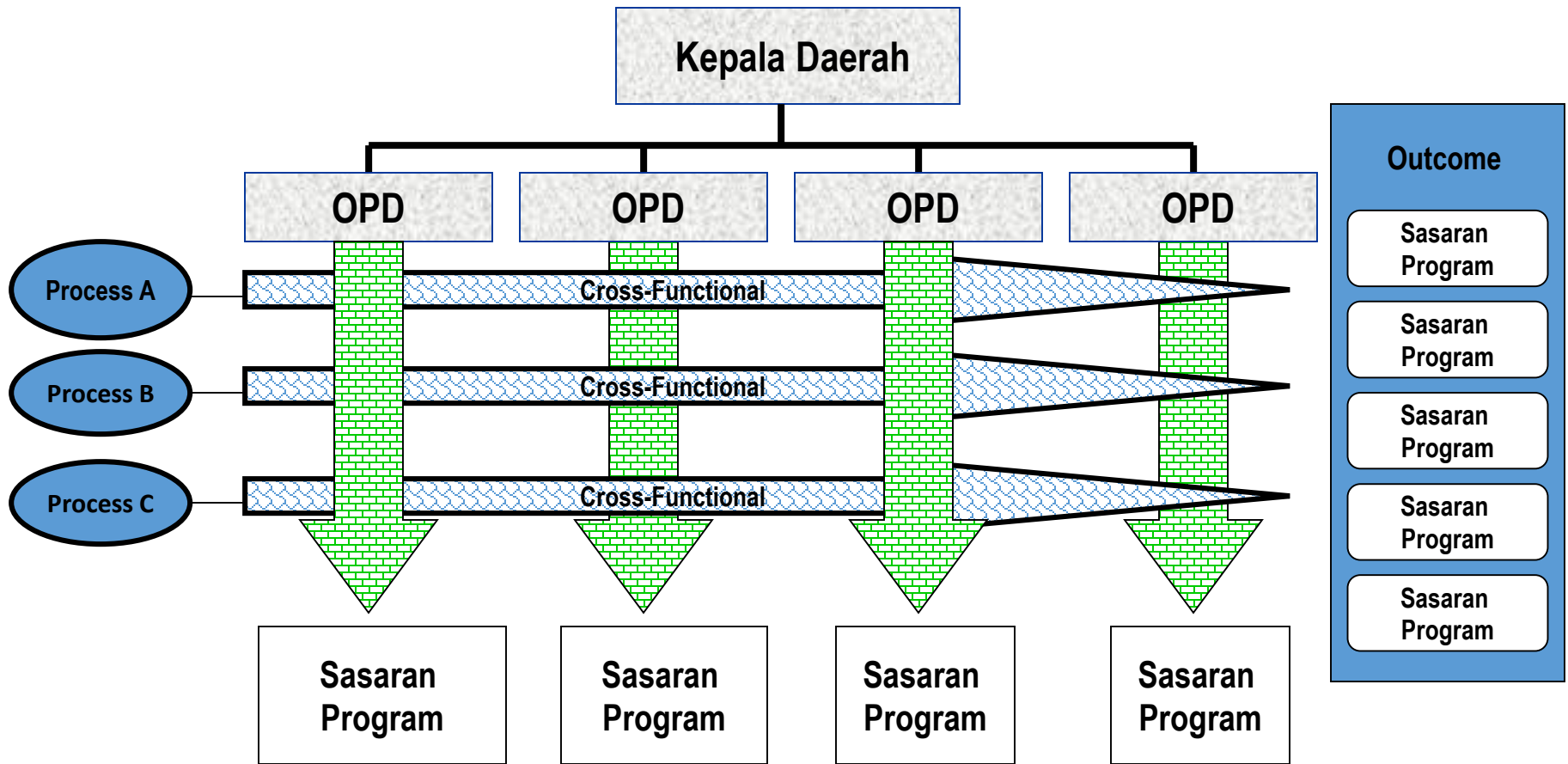
DEFINISI PROSES



TYPICAL NETWORK OF INTERACTING PROCESSES

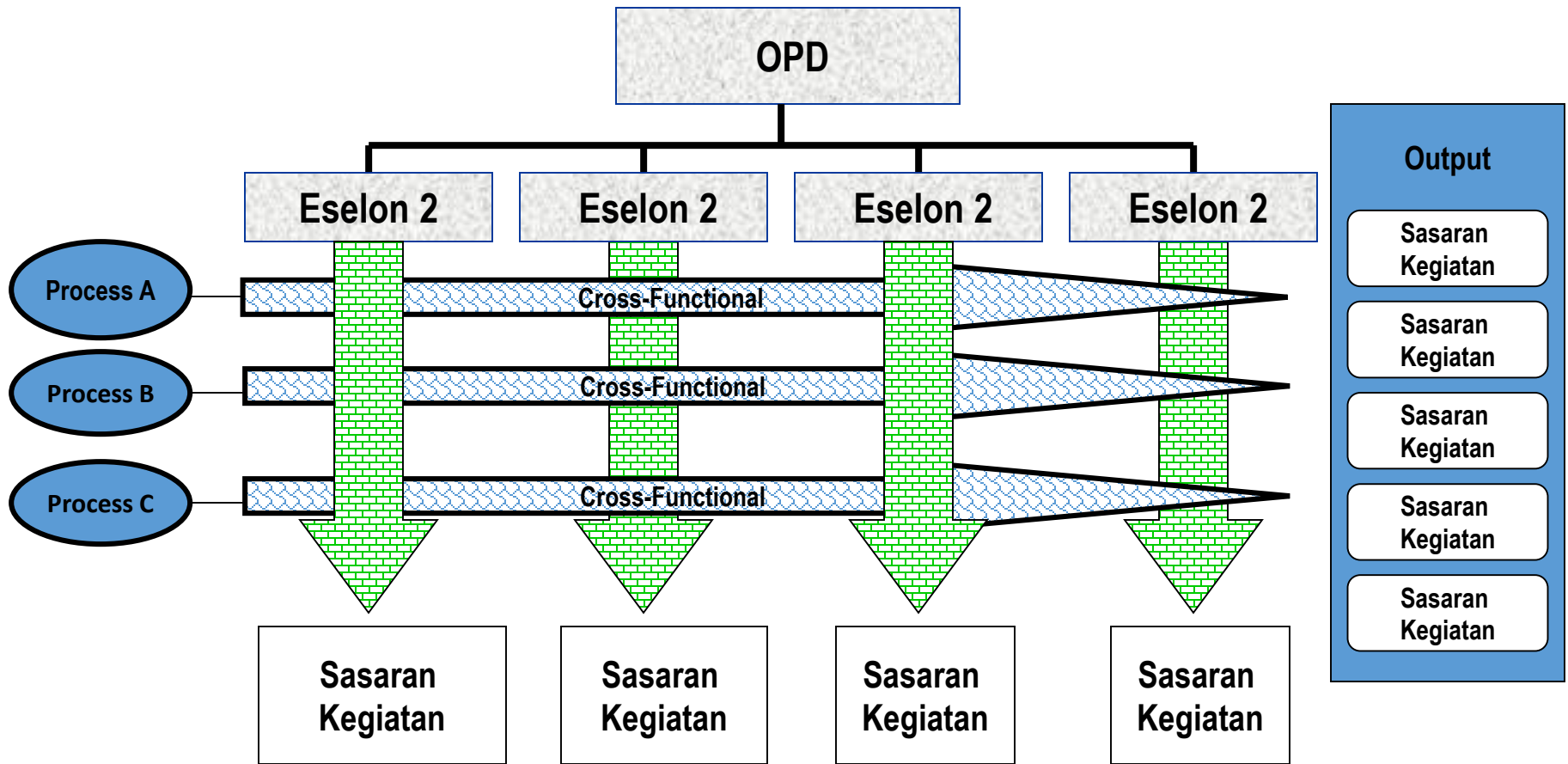


Proses Bisnis vs OPD



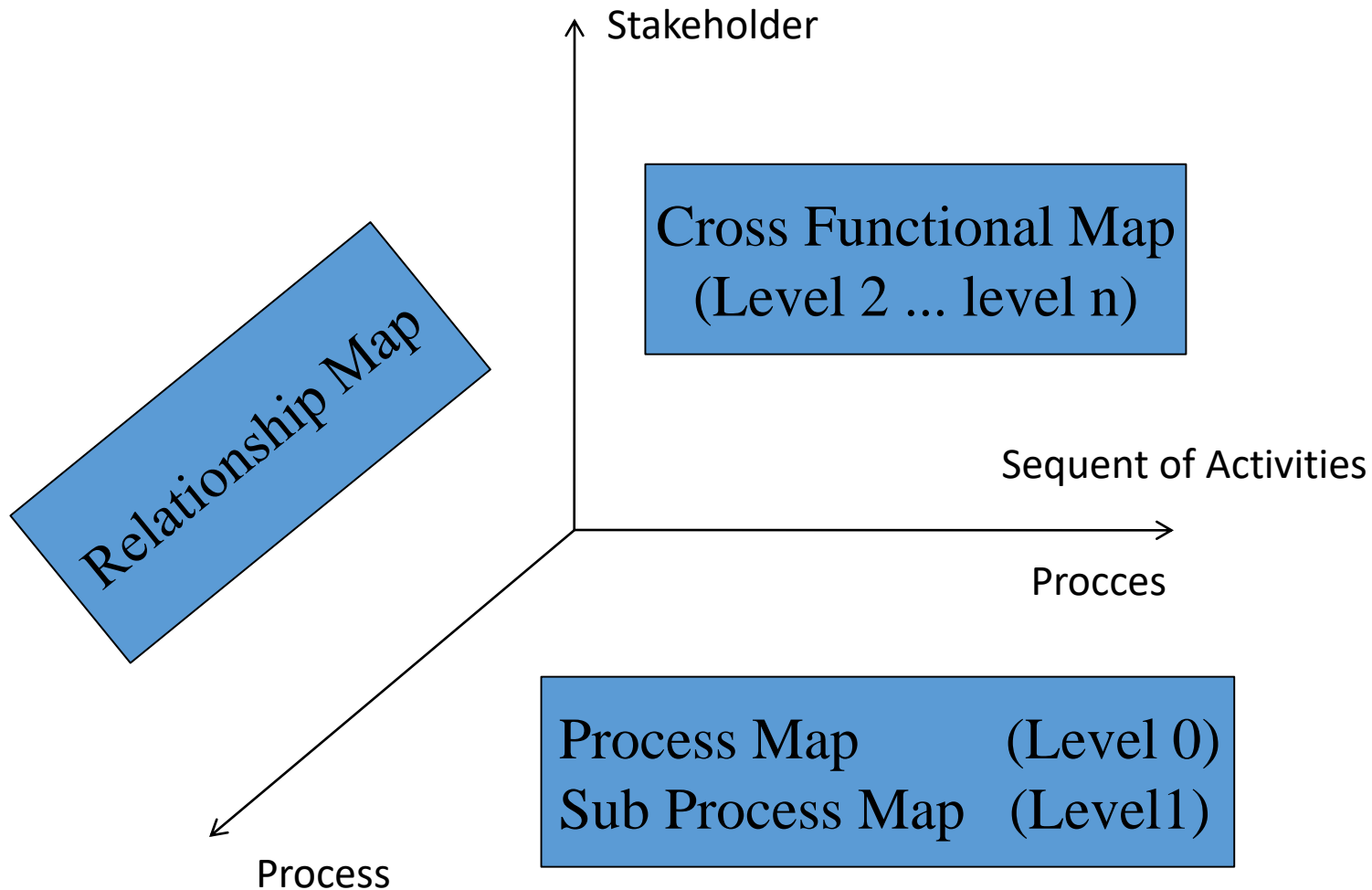
...to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers

Proses Bisnis Level IV OPD

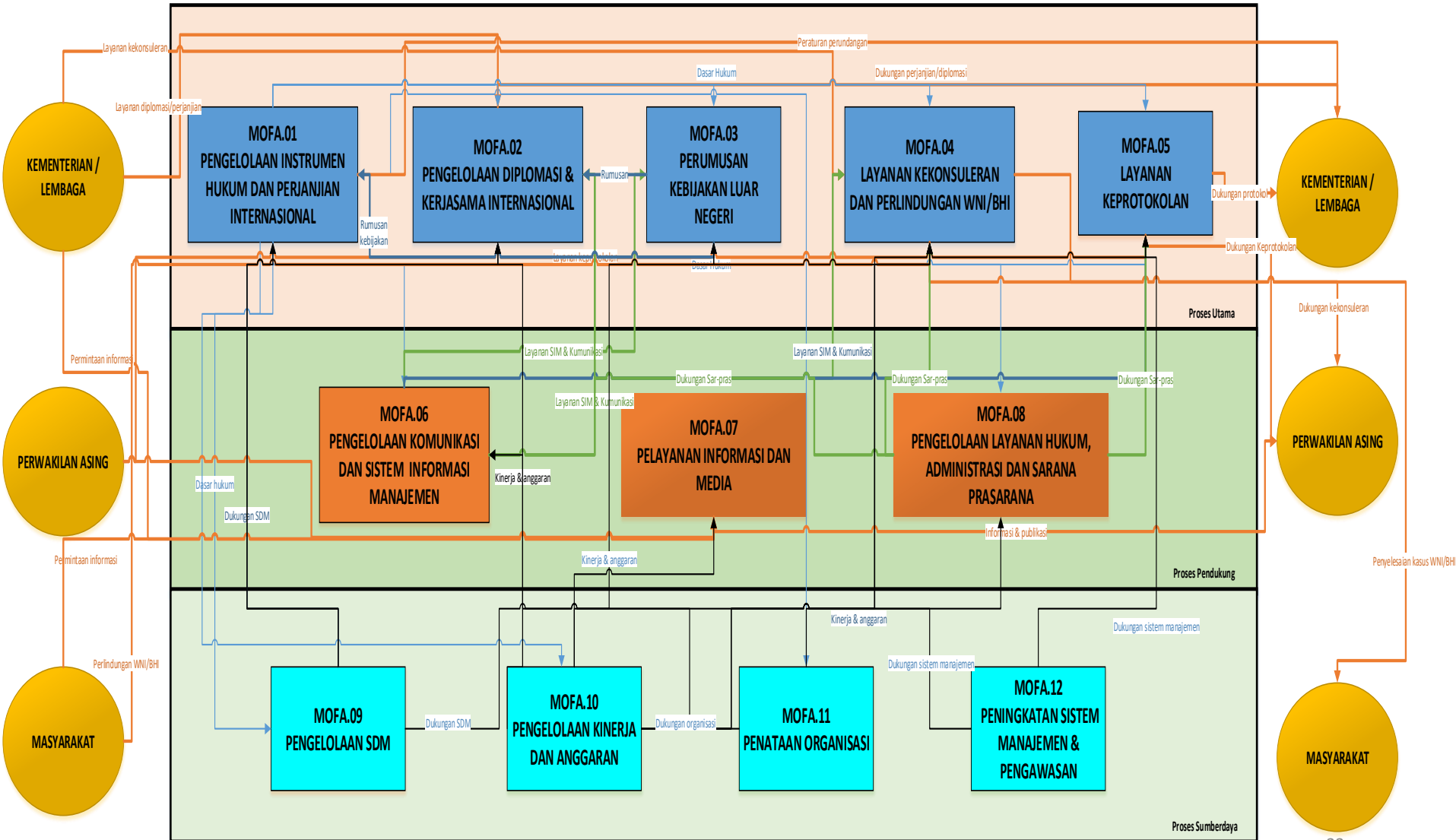


...to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers

Process Map Frame Work

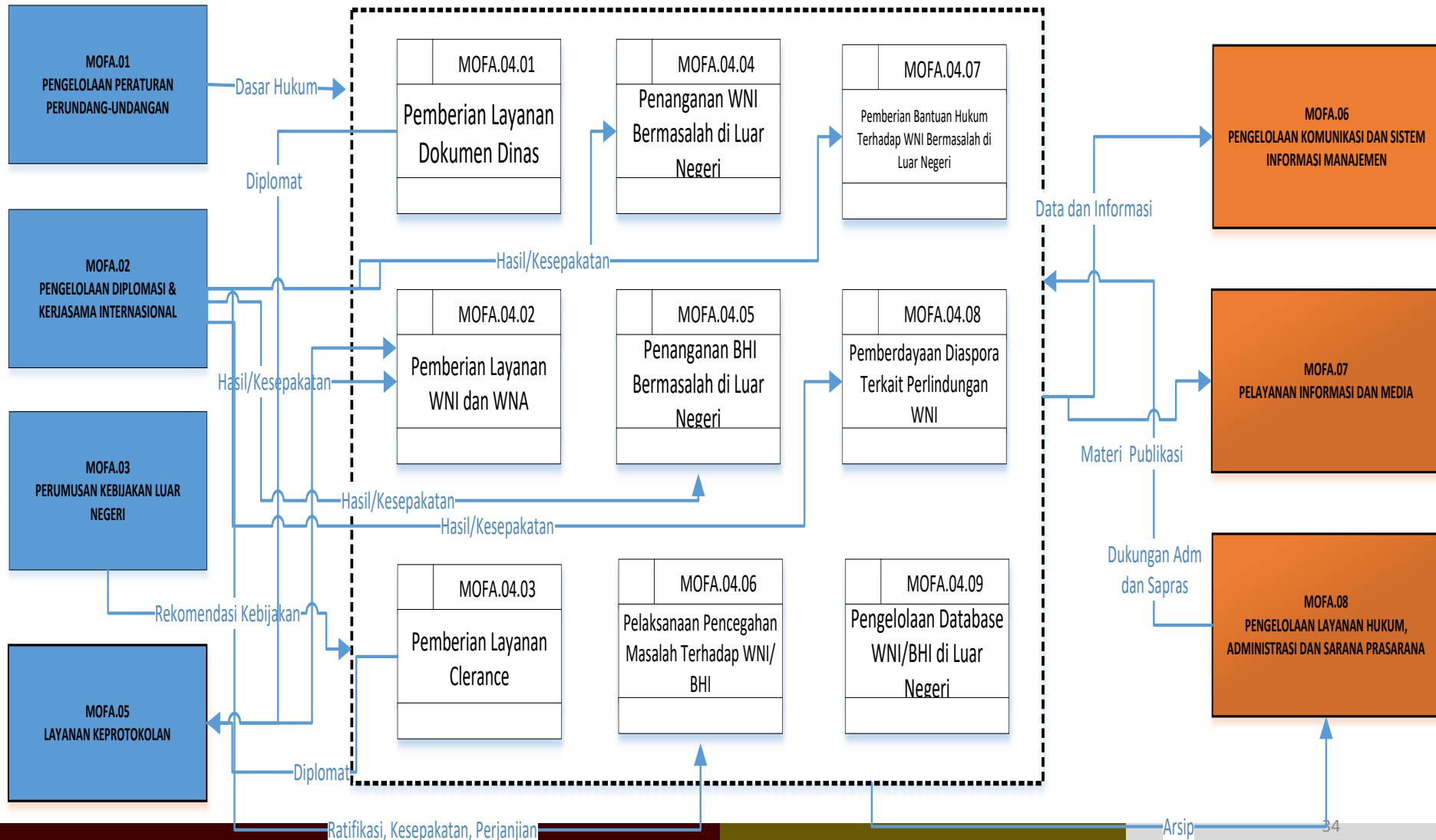


PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN LUAR NEGERI

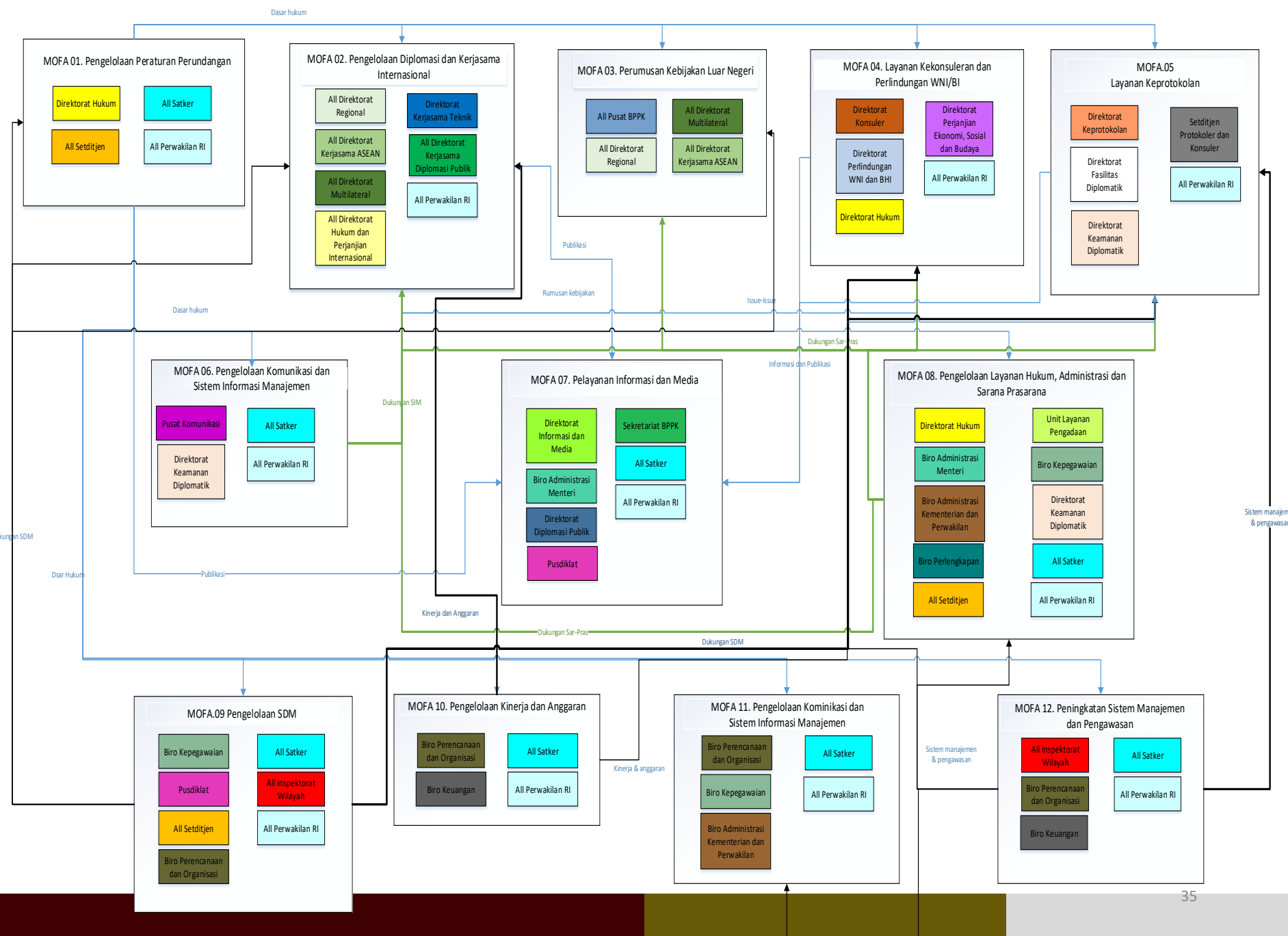


SUBPROCESS MAP

MOFA 04. LAYANAN KEKONSULERAN DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI

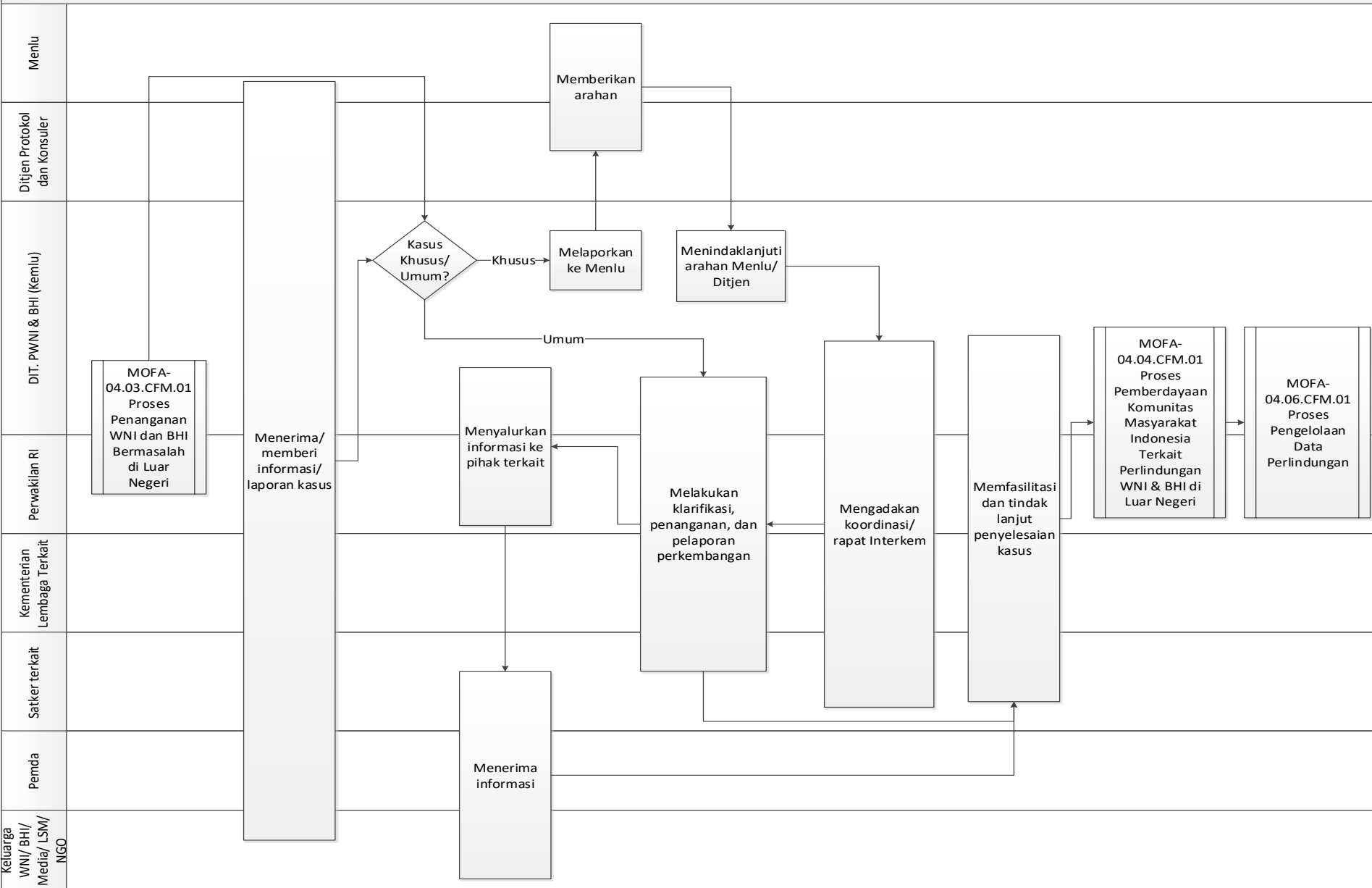


RELATIONSHIP MAP



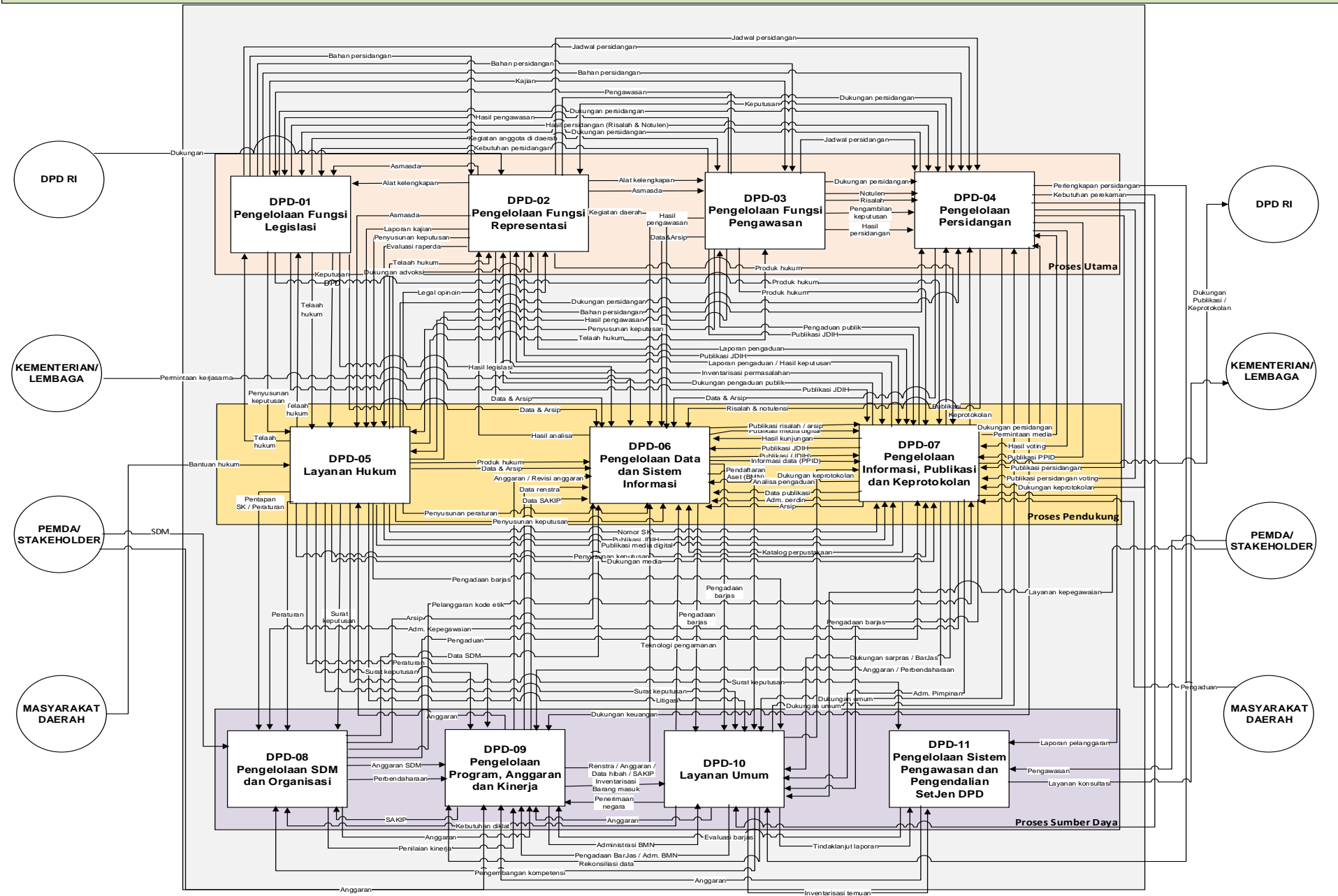
MOFA-04.03.CFM.01 Penanganan WNI dan BHI Bermasalah di Luar Negeri

	Keluarga WNI/ BHI/ Media/ LSM/ NGO	Penda	Satker terkait	Kementerian Lembaga Terkait	Perwakilan RI	DIT. PWNI & BHI (kemu)	Ditjen Protokol dan Konsuler	Menlu	
<pre> graph TD A[Menerima informasi] --> B[Menerima/ memberi informasi/ laporan kasus] B --> C{Kasus Khusus/ Umum?} C -- Khusus --> D[Melaporkan ke Menlu] D --> E[Memberikan arahan] E --> F[Menindaklanjuti arahan Menlu/ Ditjen] C -- Umum --> G[Menyalurkan informasi ke pihak terkait] G --> H[Melakukan klarifikasi, penanganan, dan pelaporan perkembangan] H --> I[Mengadakan koordinasi/ rapat Interkem] I --> J[Memfasilitasi dan tindak lanjut penyelesaian kasus] J --> K[MOFA-04.04.CFM.01 Proses Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Indonesia Terkait Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri] K --> L[MOFA-04.06.CFM.01 Proses Pengelolaan Data Perlindungan] </pre>	<p>MOFA-04.03.CFM.01 Proses Penanganan WNI dan BHI Bermasalah di Luar Negeri</p>	<p>Menerima/ memberi informasi/ laporan kasus</p>	<p>Menerima informasi</p>	<p>Menyalurkan informasi ke pihak terkait</p>	<p>Melakukan klarifikasi, penanganan, dan pelaporan perkembangan</p>	<p>Mengadakan koordinasi/ rapat Interkem</p>	<p>Memfasilitasi dan tindak lanjut penyelesaian kasus</p>	<p>MOFA-04.04.CFM.01 Proses Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Indonesia Terkait Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri</p>	<p>MOFA-04.06.CFM.01 Proses Pengelolaan Data Perlindungan</p>



PETA PROSES

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI



DPD-01 Pengelolaan Fungsi Legislasi

DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI

DPD-01.01 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan terkait Prolegnas

DPD-01.02 Pengelolaan Perancangan Undang-Undang

DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

DPD-05 LAYANAN HUKUM

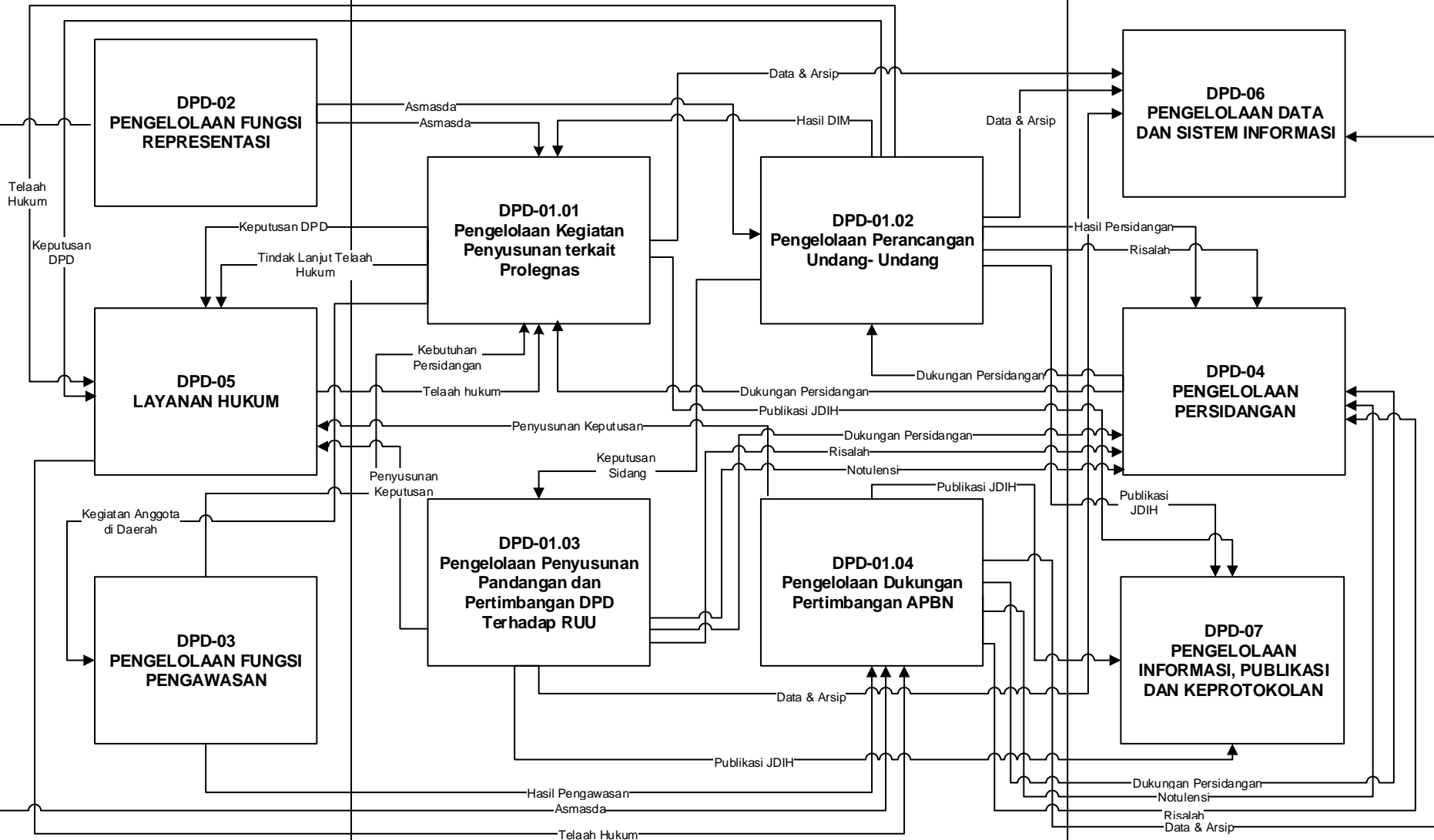
DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN

DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN

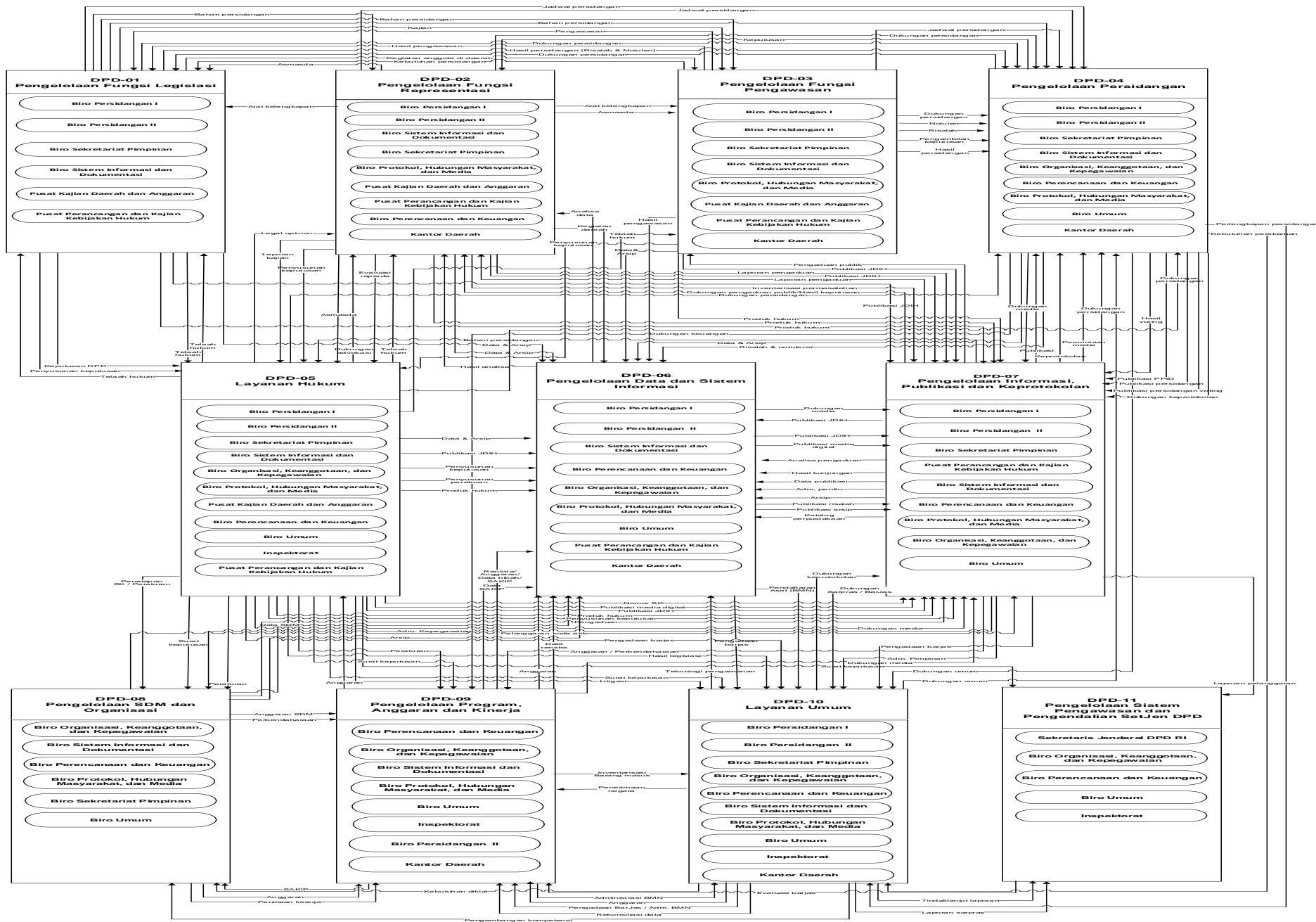
DPD-01.03 Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan DPD Terhadap RUU

DPD-01.04 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN

DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI DAN KEPROTOKOLAN



PETA RELASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI



PETA RELASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

DPD-01 Pengelolaan Fungsi Legislasi

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

DPD-02 Pengelolaan Fungsi Representasi

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Kantor Daerah

DPD-03 Pengelolaan Fungsi Pengawasan

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Kantor Daerah

DPD-04 Pengelolaan Persidangan

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

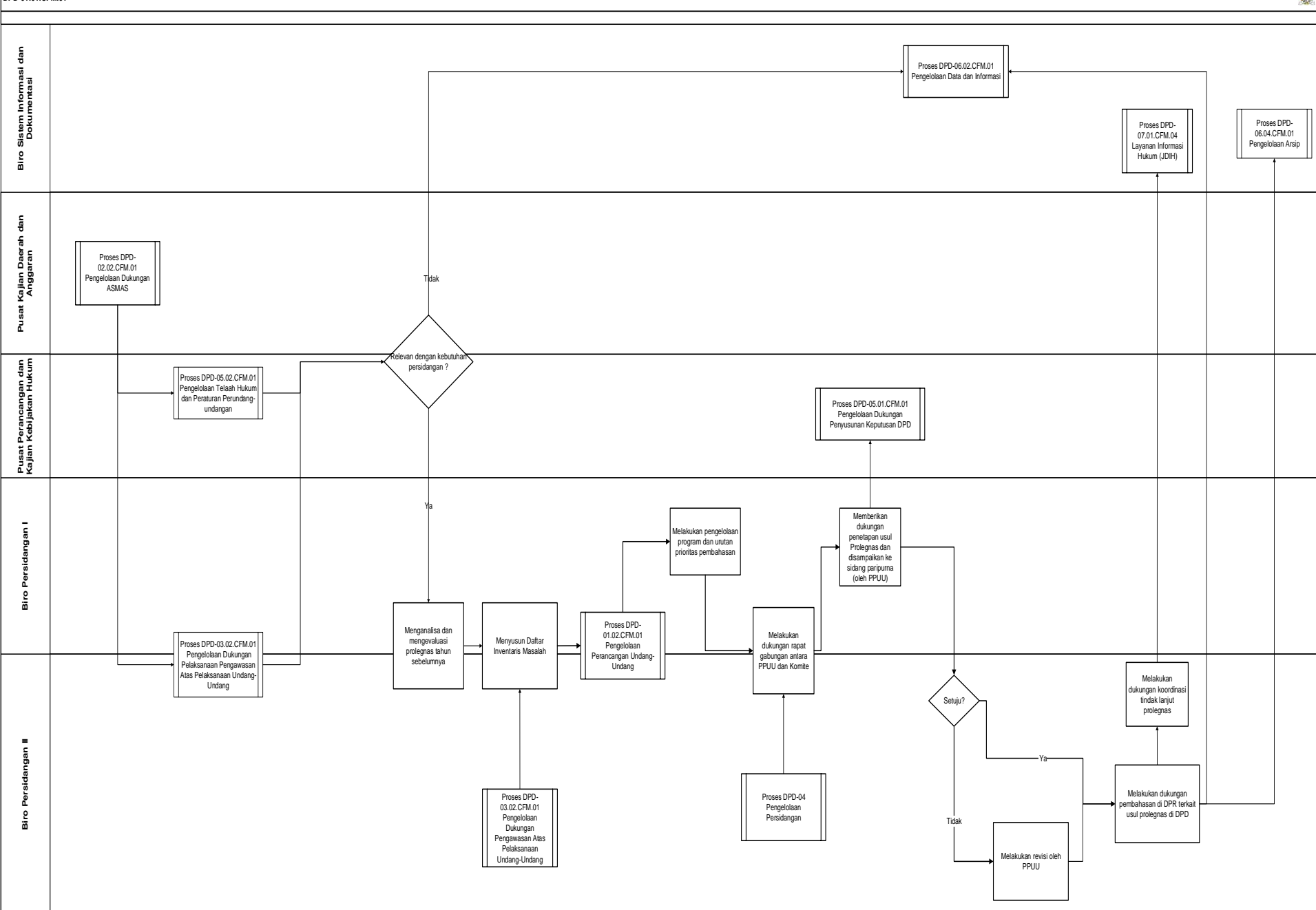
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian

Biro Perencanaan dan Keuangan

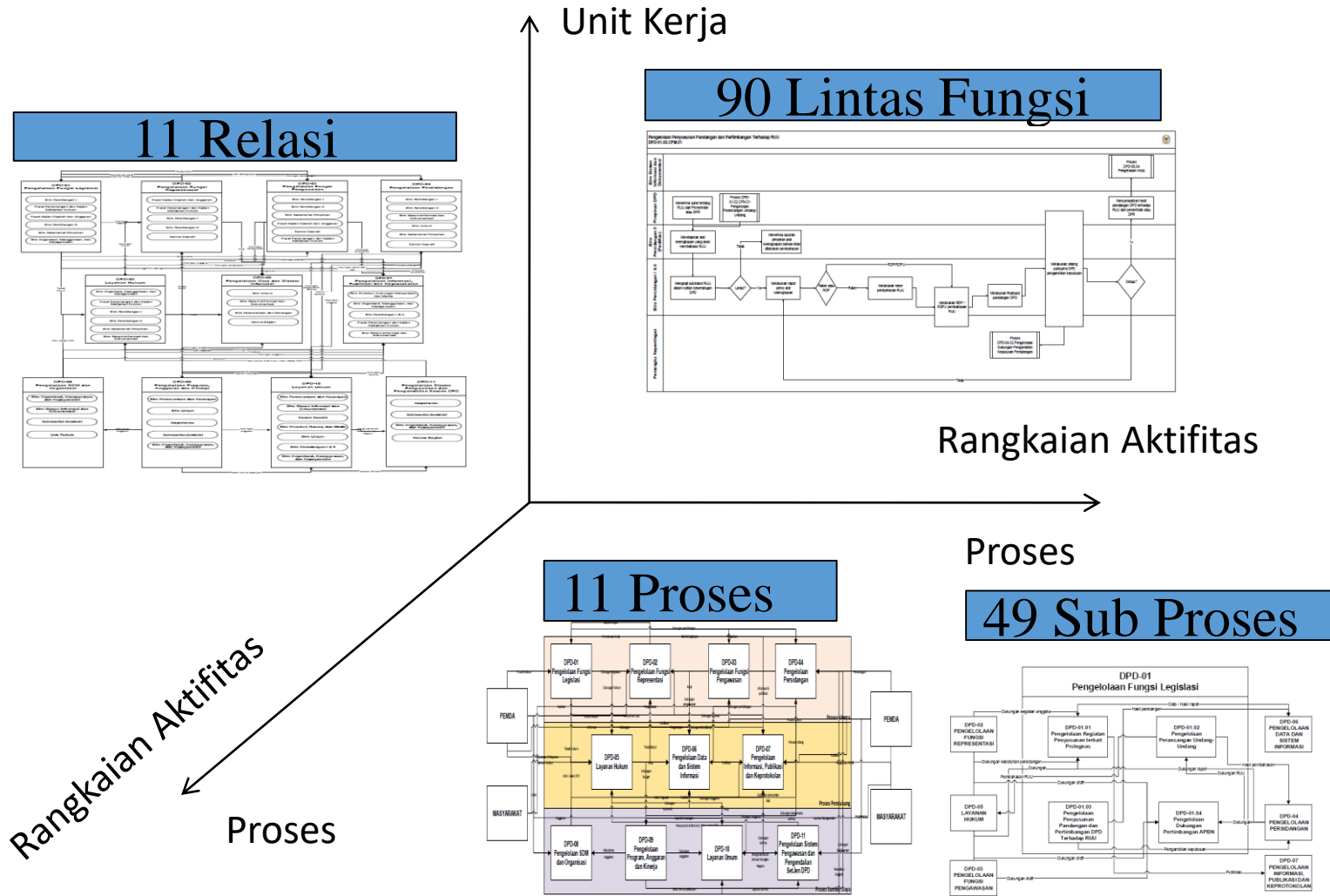
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media

Biro Umum

Kantor Daerah

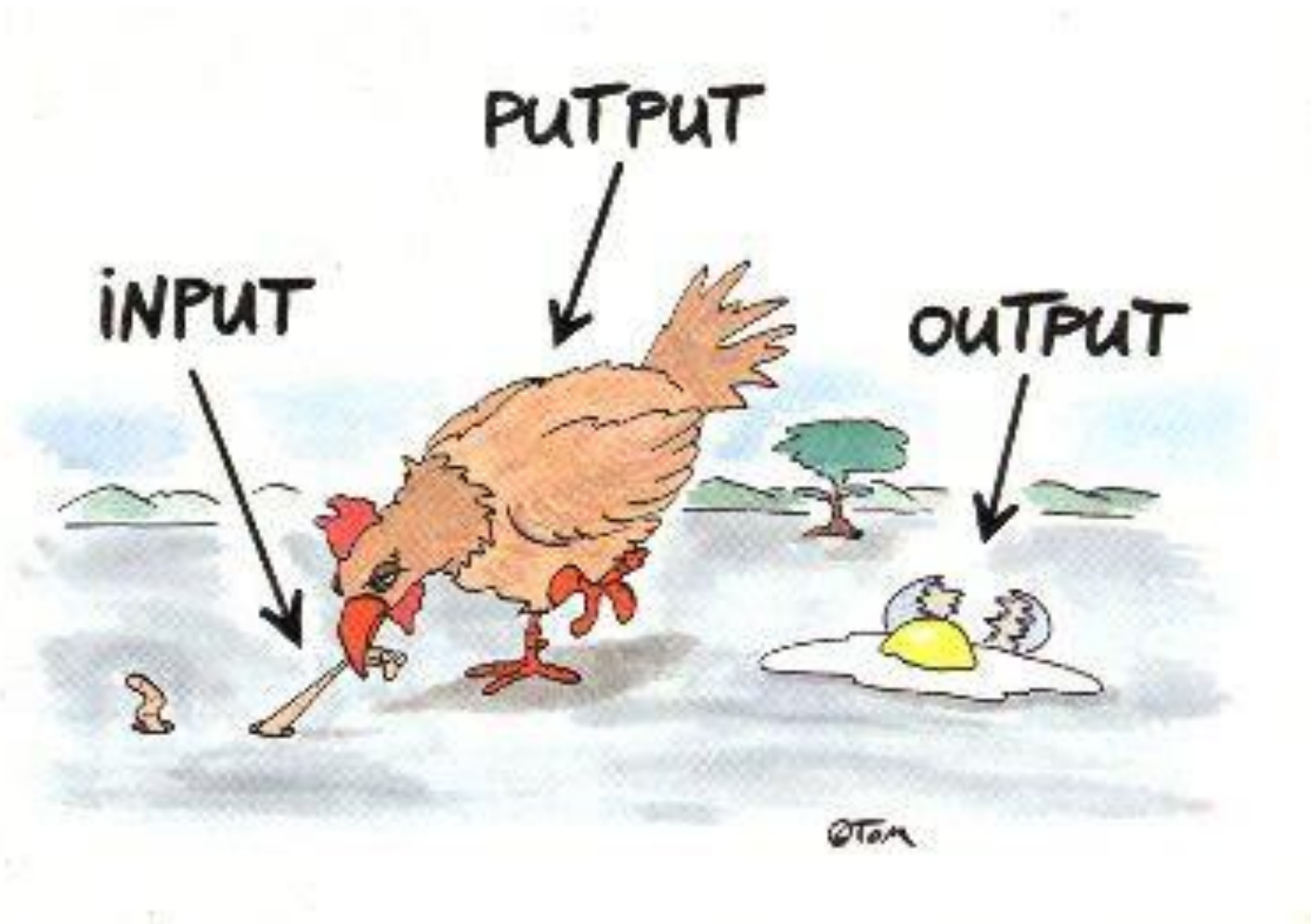


CONTOH KERANGKA PETA PROSES BISNIS



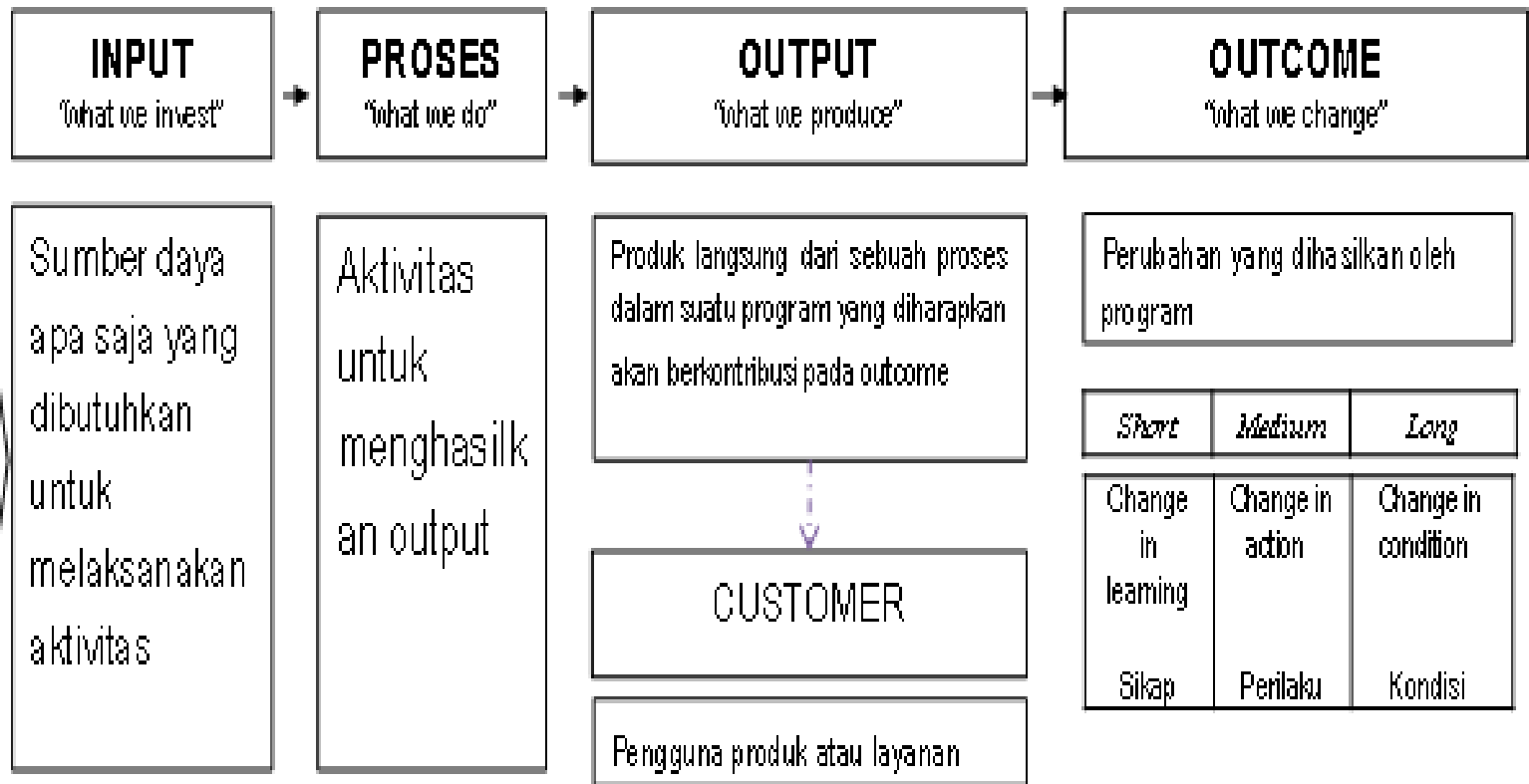
Memahami RPJMD dan Draft Probis Pemkot Biitar

Berpikir Sistematis



SITUASI

PRIORITAS



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal
				1.1.2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	1.2.1	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1.3.1	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan
				1.4.2	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
				1.4.3	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit
				1.4.4	Meningkatkan perilaku hidup sehat
				1.4.5	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.
				1.4.6	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

Visi Pembangunan Daerah tahun 2016-2021

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Mewujud-kan sumber-daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah
		2. Rata-Rata Lama Sekolah
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup

Strategi/Kebijakan dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

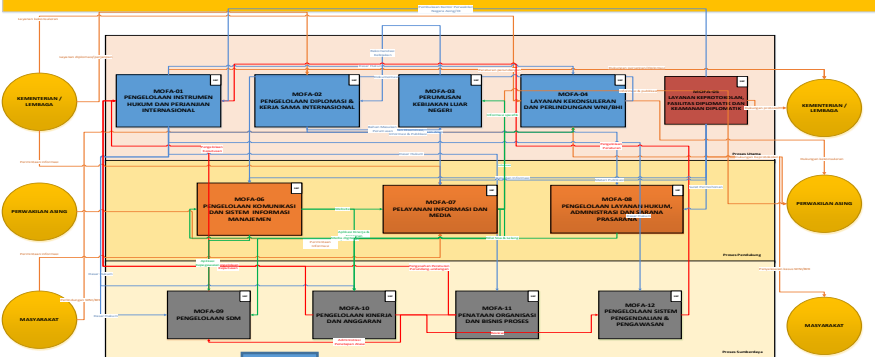
STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Program-Program yang mendukung strategi/kebijakan ini di antaranya:	
Menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan	Program Peningkatan Kesempatan kerja;	OPD yang mengampu Urusan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD yang mengampu Urusan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	OPD yang mengampu Urusan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	OPD yang mengampu Urusan Perdagangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	OPD yang mengampu Urusan Pangan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	OPD yang mengampu Urusan Pertanian

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 3 : Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal Unggulan Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Industri, Pariwisata dan Sektor Lainnya, dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja serta Berwawasan Lingkungan									
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,83	6,00	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Penanaman Modal	OPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal
	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal	Pendapatan perkapita	Ribu Rp	16.983,67	25.179,48	Program peningkatan ketahanan pangan	Pangan	OPD yang mengampu Urusan Pangan
	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Rasio Gini	Angka	0,24	0,21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
			Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi	Kawasan	-	6,00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian

Hubungan Peta Probis dengan SOP Makro dan Mikro

PETA BISNIS PROSES

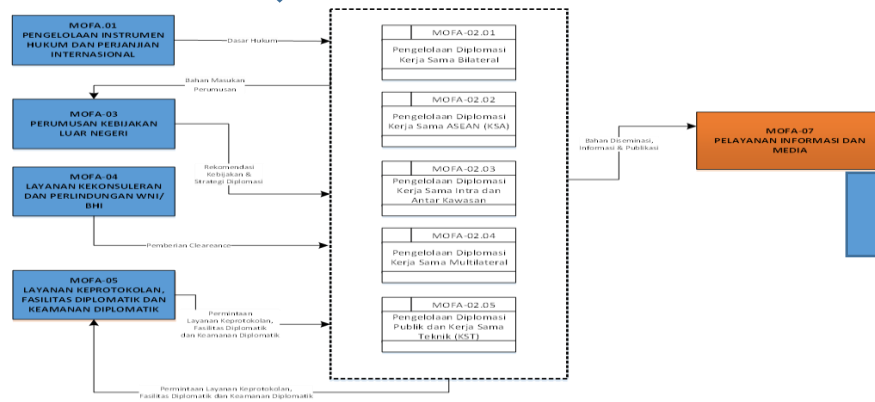
PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN LUAR NEGERI



1

PETA SUB PROSES

SUBPROCESS MAP MOFA-02 PENGELOLAAN DIPLOMASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

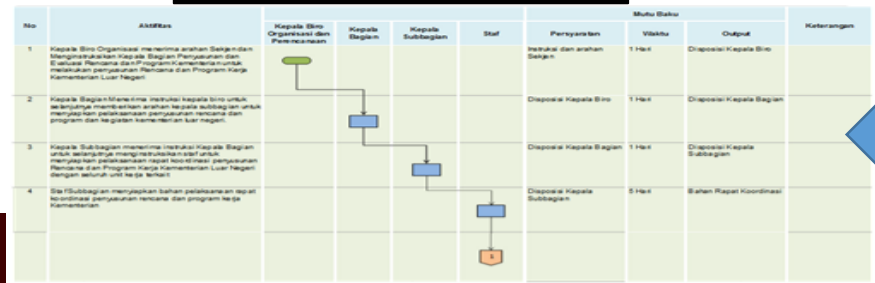


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO



SOP MIKRO

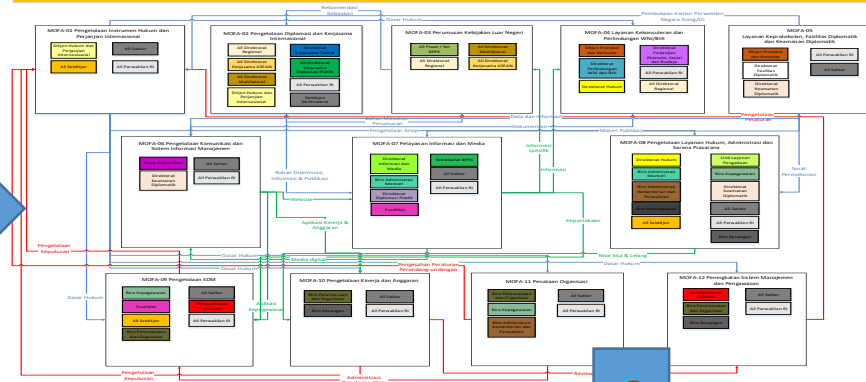
WORKING PROCEDURES



2

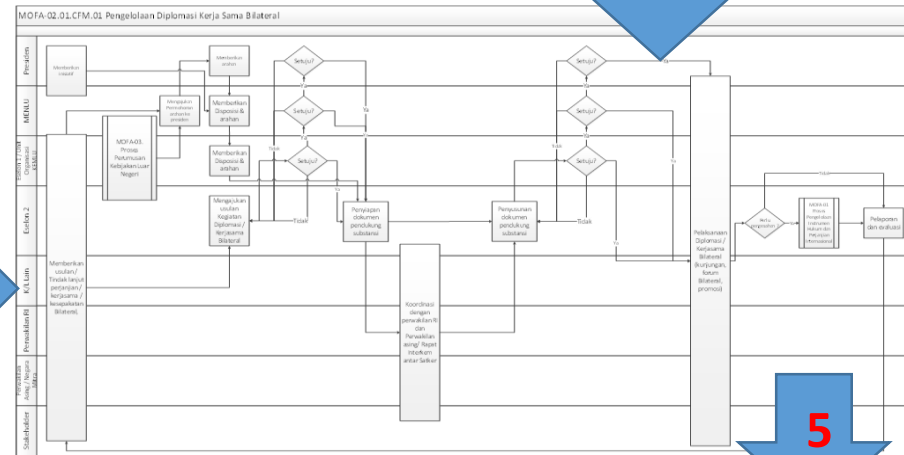
PETA HUBUNGAN

RELATIONSHIP MAP KEMENTERIAN LUAR NEGERI



3

PETA LINTAS FUNGSI



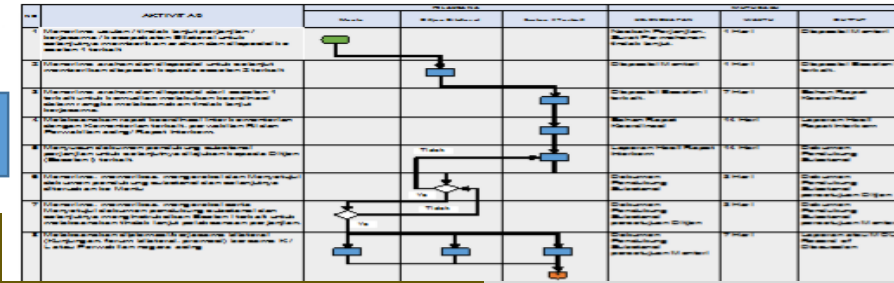
5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKRO



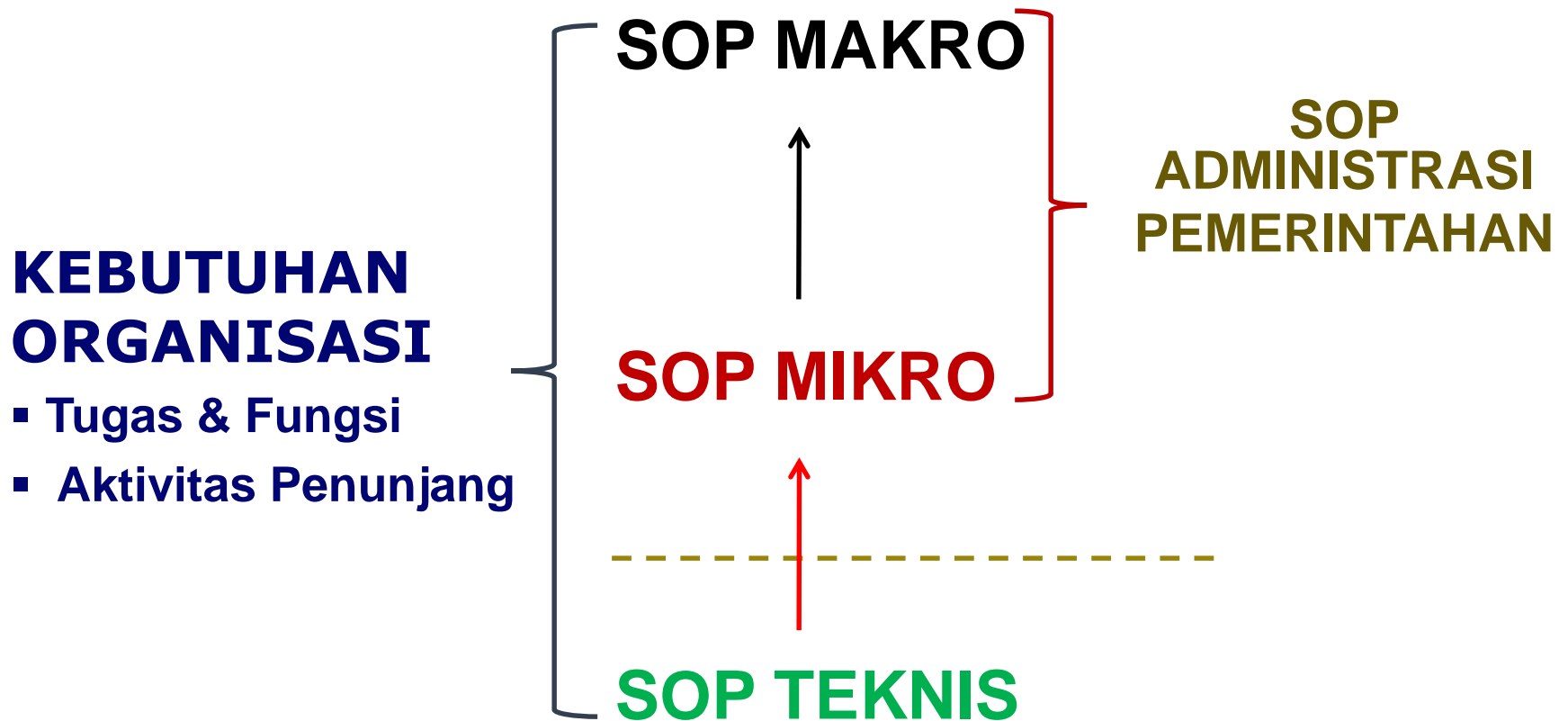
SOP MAKRO

WORKING PROCEDURES

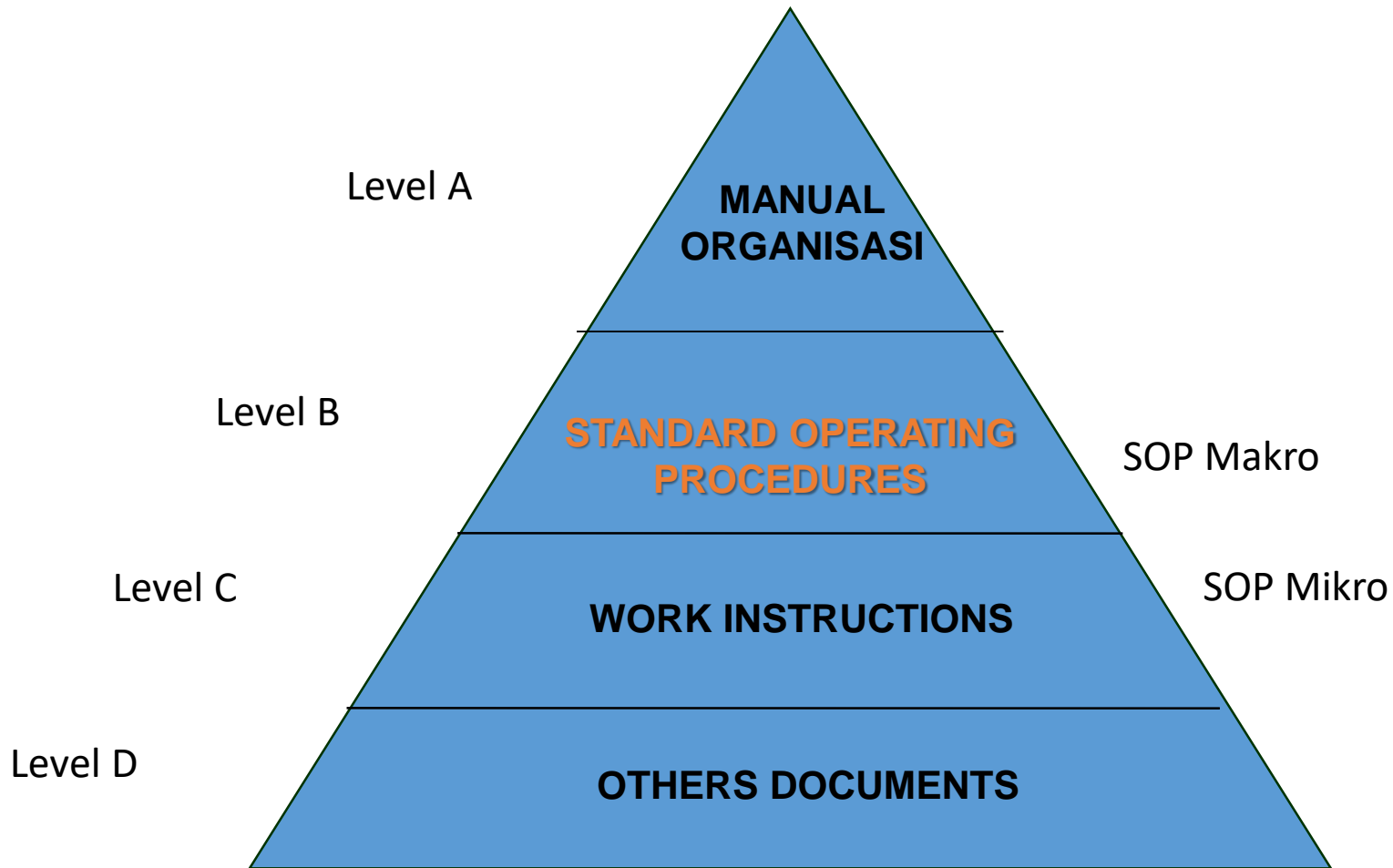


6

Hubungan Istilah Jenis dan Cakupan SOP dalam PermenPAN 35 tahun 2012

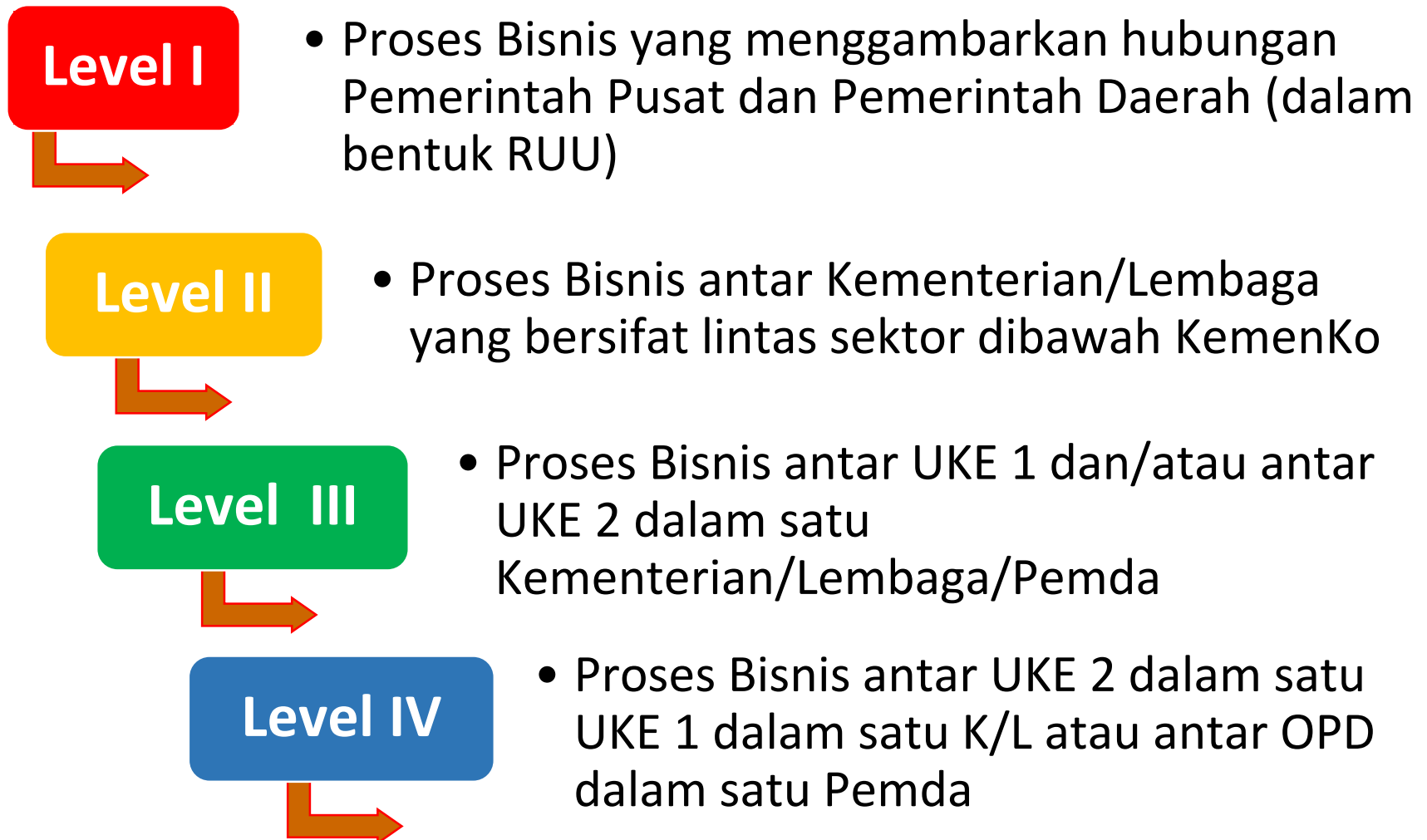


Level Dokumen

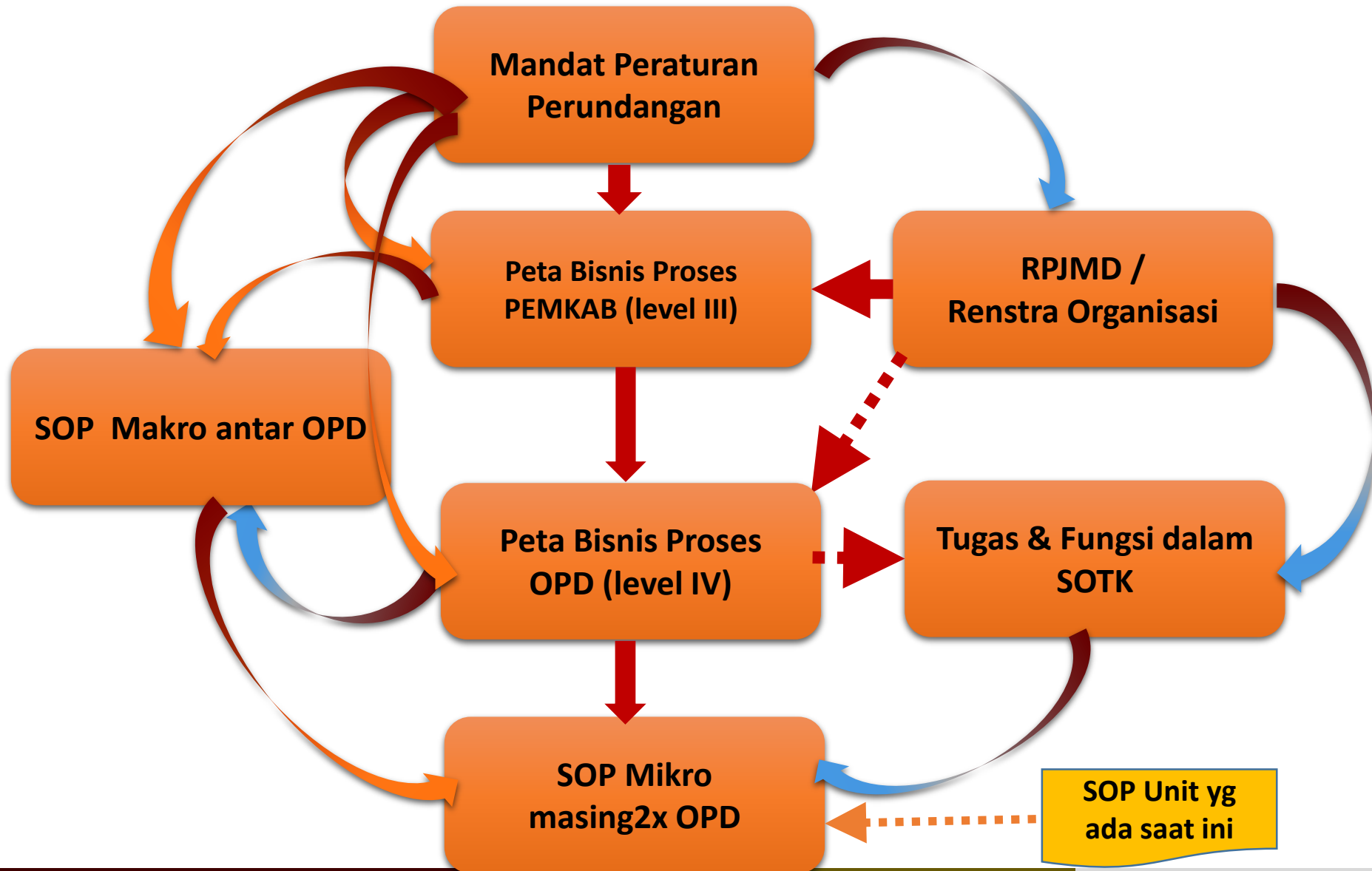


Level Proses Bisnis dan SOP

Rencana Road Map KeMenPanRB terkait Bisnis Proses secara Nasional untuk Kementerian/Lembaga dibagi **4 level** sbb:



Kerangka Kerja Menyusun Probis & SOP





SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

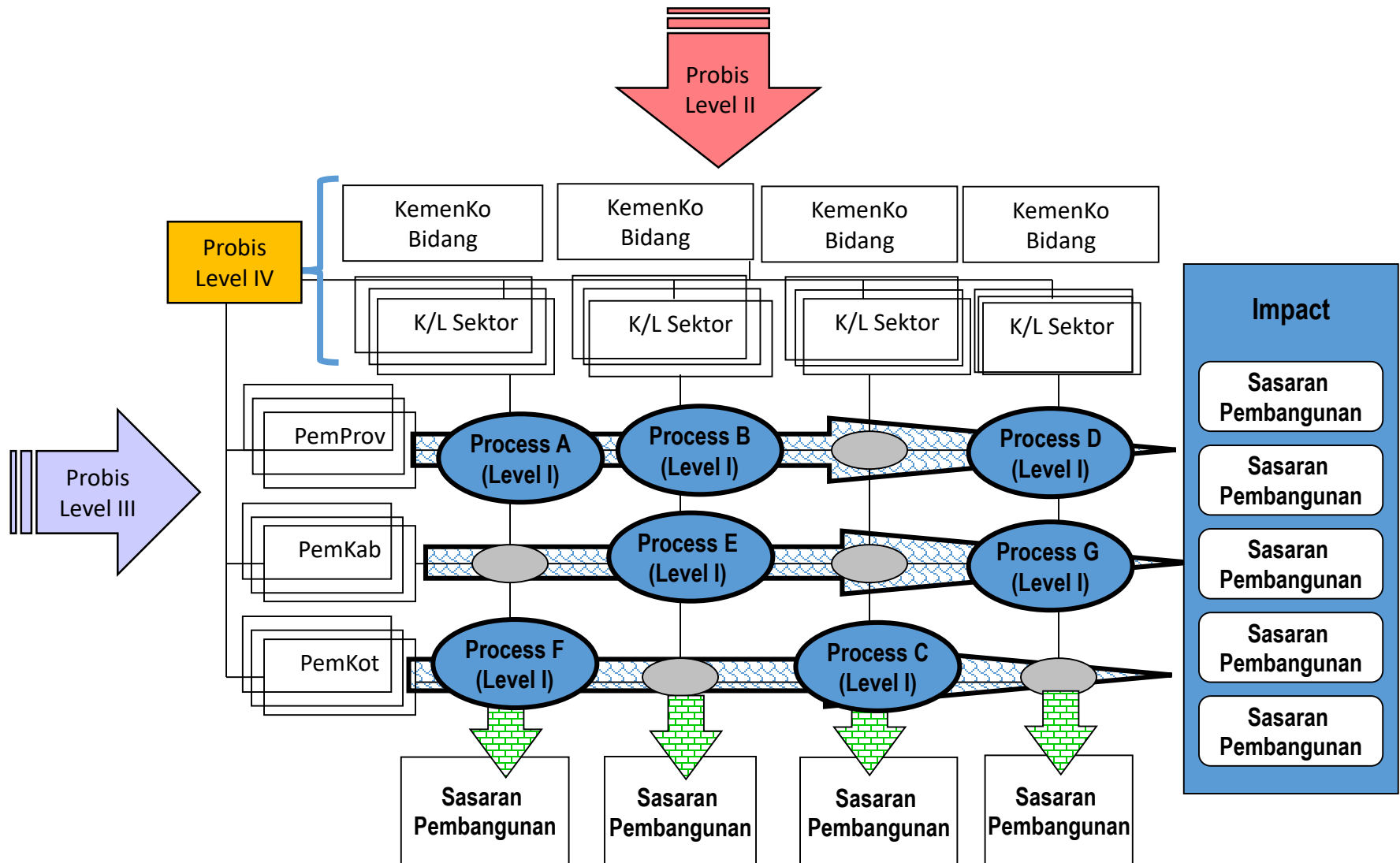
Pasal 77

- (1) Kementerian dan Kementerian Koordinator harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Proses bisnis penanganan isu antar Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator sesuai bidangnya.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/Lembaga yang terkait.

Integrasi Proses Bisnis Level I, II, III, & IV



Tentang Nara Sumber

OUR CLIENTS GOVERNMENTS



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA





Terima
kasih

CONTACT US:



Telp: (021) 2902 2128 – 29 / Faks: (021) 2902 2121



martinus@ccg.co.id

0811 180352



Grand Slipi Tower Lt. 33 Unit C

Jl. Letjend S. Parman Kav. 22 – 24

Jakarta 11480